

Muhammad Juwanda | M. Erwin Dwi Listyanto | Edy Suhartono | Estherlina Sagajoka  
Gontom Citoro Kifli | Dwi Purnamawati Widiastuti | Dina Omayani Dewi  
Surya Abadi Sembiring | Reyna Virginia Nona | Bayu Mahendra

# KONSEP EKONOMI PERTANIAN



**litrus.**

Muhammad Juwanda | M. Erwin Dwi Listyanto | Edy Suhartono | Estherlina Sagajoka  
Gontom Citoro Kifli | Dwi Purnamawati Widiastuti | Dina Omayani Dewi  
Surya Abadi Sembiring | Reyna Virginia Nona | Bayu Mahendra

# KONSEP EKONOMI PERTANIAN

Penerbit  
**litrus.**

---

## KONSEP EKONOMI PERTANIAN

---

Ditulis oleh :

**Dr. Muhammad Juwanda, S.P., M.P.**

**M. Erwin Dwi Listyanto, M.M.**

**Edy Suhartono, SE., MM.**

**Estherlina Sagajoka, SE., M.Si.**

**Dr. Ir. Gontom Citoro Kifli, M.Si.**

**Dwi Purnamawati Widiastuti, S.P., M.Sc., Ph.D.**

**Dina Omayani Dewi, SP., Msc.**

**Dr. Ir. Surya Abadi Sembiring, M.Si.**

**Dr Reyna Virginia Nona S.E, M.M.A.**

**Bayu Mahendra, S.P., M.M.A.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Juni 2023

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Noufal Fahriza

**ISBN : 978-623-8301-82-9**

viii + 126 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2023

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Konsep Ekonomi Pertanian. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Sejarah dan perkembangan pertanian, Ruang lingkup bidang pertanian, Ciri-ciri pertanian di Indonesia, Masalah-masalah pokok ekonomi pertanian, Faktor-faktor kelembagaan dalam ekonomi pertanian, Prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani, Faktor produksi tanah dalam ekonomi pertanian, Faktor produksi tenaga kerja dalam ekonomi pertanian, Produksi modal dalam ekonomi pertanian, Pasar dan kebijaksanaan tata Niaga, Peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian, Pengembangan kelembagaan dan modal sosial dalam pengembangan petani sawah.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, Malang 28 Mei 2023



# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR..... III**

**DAFTAR ISI ..... V**

## **BAB 1.**

SEJARAH PERTANIAN .....	1
Asal Mula Pertanian.....	1
Perkembangan Pertanian di Indonesia .....	4
Daftar Pustaka.....	15

## **BAB 2.**

MASALAH EKONOMI PERTANIAN.....	17
Pendahuluan .....	17
Konsep Ekonomi Pertanian.....	20
Masalah Ekonomi Pertanian .....	23
Tantangan dan Pemecahan Masalah Ekonomi Pertanian .....	26
Penutup .....	27
Daftar Pustaka.....	28

### **BAB 3.**

FAKTOR-FAKTOR KELEMBAGAAN DALAM EKONOMI PERTANIAN .....	29
Lembaga Ekonomi Pertanian .....	29
Sistem Pendukung ( <i>Supporting Systems</i> )	
Kelembagaan Ekonomi Pertanian .....	38
Daftar Pustaka.....	40

### **BAB 4.**

FAKTOR PRODUKSI TANAH DALAM EKONOMI PERTANIAN .....	43
Ekonomi Pertanian .....	43
Faktor Produksi .....	44
Faktor Produksi Tanah dalam Ekonomi Pertanian.....	45
Daftar Pustaka.....	55

### **BAB 5.**

PRODUKSI MODAL DALAM EKONOMI PERTANIAN .	59
Pengertian Modal .....	59
Sumber Daya Modal .....	63
Kendala dalam Ketersediaan Modal.....	67
Solusi dalam Masalah Permodalan Petani.....	67
Daftar Pustaka.....	68

### **BAB 6.**

PASAR DAN KEBIJAKSANAAN TATA NIAGA .....	73
Pendahuluan .....	73
Pengertian Pasar .....	74
Pengertian Kebijakan Tataniaga.....	77
Tujuan dan Instrumen Kebijakan Tataniaga .....	78
Margin Tataniaga tanpa dan dengan Campur Tangan Pemerintah .....	80

Saluran Tataniaga tanpa dan dengan Campur Tangan Pemerintah .....	83
Daftar Pustaka.....	85

## **BAB 7.**

PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN .....	87
Pendahuluan .....	87
Permasalahan Pertanian di Indonesia.....	88
Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian.....	92
Daftar Pustaka.....	96

## **BAB 8.**

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PETANI SAWAH ..	97
Pendahuluan .....	97
Perkembangan Kelembagaan .....	98
Modal Sosial Pertanian.....	102
Daftar Pustaka.....	111

## **BIODATA PENULIS ..... 115**





## **BAB 1.**

# **SEJARAH PERTANIAN**

*Oleh : Dr. Muhammad Juwanda, S.P., M.P.*

*Universitas Muhadi Setiabudi, Program Studi Agribisnis*

### **Asal Mula Pertanian**

---

Bumi merupakan planet di sistem tatasurya yang menyediakan bermacam-macam sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berbagai macam sumberdaya alam diciptakan oleh Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk ciptaannya yang hidup di bumi dimulai dari sejak diciptakannya manusia pertama di Bumi yaitu Adam as dan Hawa sampai sekarang di era zaman modern.

Pertanian di dunia sejak zaman dahulu (manusia purba) sampai zaman sekarang didukung oleh beberapa macam sumber daya alam yang tersedia di alam sekitar. Air, udara ( $O_2$  dan  $CO_2$ ) dan sinar matahari merupakan sumberdaya alam yang sebagai kunci dari makhluk hidup dapat hidup dan berkembangbiak di planet bumi. Air digunakan oleh manusia dan hewan untuk minum. Air diserap melalui akar oleh tumbuhan/tanaman digunakan untuk membantu dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya yang dimulai dengan

adanya reaksi fotosintesis. Oksigen ( $O_2$ ) digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Karbondioksida ( $CO_2$ ) digunakan oleh tumbuhan/tanaman dalam reaksi fotosintesis untuk memperoleh energi sehingga dapat menjalankan aktivitas kehidupannya. Sinar matahari digunakan oleh makhluk hidup di alam semesta untuk melangsungkan kehidupannya, seperti pada tanaman/tumbuhan untuk membantu proses reaksi fotosintesis.

Sejarah pertanian di Indonesia khususnya masyarakat petani Jawa sejak jaman prasejarah, bercocok tanam merupakan mata pencaharian pokok yang umum dilakukan. Hal ini bisa dilihat sampai zaman modern sekarang ini bahwa sebagian besar masyarakat petani mempunyai mata pencaharian sebagai seorang petani. Metode bercocok tanam dan teknologi yang digunakan yang membedakan antara petani zaman dahulu yang masih menggunakan system ladang berpindah, alat-alat kuno seperti bajak, cangkul dan teknik budidaya yang turun temurun ke tingkat generasi berbeda dengan pertanian zaman modern sekarang ini mereka sudah menggunakan teknologi hasil dari ilmu pengetahuan yang berkembang setiap saat. (Subroto, 1985).

### **1. Zaman Purba**

Manusia pada zaman pra sejarah dalam memenuhi kebutuhan makanannya yaitu dengan mengambil secara langsung di alam. Mereka mengambil buah-buahan dan sayuran langsung dari alam. Mereka berburu hewan rusa, kerbau, kelinci, domba, babi hutan dan lain-lain langsung dari alam untuk dikonsumsi dagingnya. Mereka belum mengenal sistem bercocok tanam atau teknologi mengolah tanah untuk ditanami dan diambil hasilnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hidupnya. Keadaan seperti ini berlangsung selama beribu-ribu tahun sampai ditemukannya peradaban yang lebih maju mengenai pertanian primitif dengan sistem olah tanam lahan yang berpindah-pindah.

## **2. Pertanian Primitif**

Pada zaman primitif manusia melakukan kegiatan pertanian dengan cara ladang berpindah. Sistem pertanian ladang berpindah biasanya dibagi beberapa petak luasan yang didasarkan atas jumlah keluarga pada suatu komunitas masyarakat petani. Setiap keluarga dalam masyarakat adat memiliki hak atas 1 – 2 ha lahan hutan untuk dijadikan ladang pertanian (Rifki, 2017). Ladang atau sawah mereka gunakan dan tanami berbagai macam tanaman untuk diambil hasilnya untuk dikonsumsi setelah lama mereka tanami kemudian setelah sekian lama akhirnya hasilnya tidak maksimal lagi atau sedikit sebagai akibat ketersediaan hara yang semakin menurun sehingga terjadi penurunan kesuburan tanah. Mereka melakukan kegiatan bercocok tanam tanpa adanya input pupuk atau teknologi untuk meningkatkan atau menjaga kesuburan tanah. Mereka akan berpindah ladang pada saat tanah yang mereka garap sudah tidak produktif lagi dengan cara membuka hutan untuk dijadikan ladang baru mereka untuk bercocok tanam. Pengolahan tanah mereka lakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali / primitif dengan menggunakan kayu yang di pertajam dibagian ujungnya yang dapat mereka manfaatkan sebagai alat bantu untuk mengolah tanah untuk mereka tanami.

Pasar penjualan hasil panen dari proses bercocok tanam belum ada. Hasil panen pada umumnya mereka konsumsi sendiri sebagai bahan pangan kehidupan sehari-hari. Adapun sistem jual beli barang atau bahan pangan mereka menggunakan sistem barter atau pertukaran barang atau bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya pertukaran ubi kayu dengan buah-buahan, bibit tanaman dengan kelapa dan lain-lain.

## **3. Pertanian Modern**

Manusia semakin lama semakin bertambah jumlahnya dan mulai berfikir bagaimana caranya untuk dapat menetap disuatu

wilayah untuk bercocok tanam tanpa harus berpindah-pindah ladang. Manusia mulai berfikir untuk dapat mempertahankan kesuburan tanah ditempat mereka bercocok tanam salahnya yaitu dengan melakukan kegiatan pemupukan menggunakan pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang tersedia di alam. Namun karena kandungan hara yang tidak tinggi mengakibatkan pertumbuhan dan produksi tanaman pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perkembangan zaman dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Kehidupan manusia menjadi lebih baik dilihat dari kesejahteraan pemenuhan kebutuhan pangan dari awal zaman dahulu sampai zaman modern sekarang ini karena kemajuan teknologi dibidang pertanian (Gunawan, 2014). Pertanian di dunia semakin maju setelah terjadinya revolusi hijau yang terjadi di beberapa negara antara lain Inggris, Perancis, Amerika, Indonesia dan lain-lain. Revolusi hijau merupakan suatu bentuk perubahan modernisasi atau kemajuan teknologi di bidang pertanian. Modernisasi tersebut meliputi peralatan pertanian yang sudah modern, sistem pengolahan tanah (adanya traktor), pemupukan (pupuk kimia pabrikan), penggunaan bibit unggul (benih hibrida), penanaman (mesin tanam), pengendalian hama dan penyakit (pestisida kimia), pengairan (mesin pompa air), panen (mesin panen), pascapanen, pengolahan hasil panen (mesin-mesin pengolahan hasil pertanian, contoh : oven, blender) dan lain-lain (Gultom and Harianto, 2021).

## **Perkembangan Pertanian di Indonesia**

---

Pertanian di Indonesia dimulai dari zaman pertanian primitif/tradisional, kemudian dilanjutkan pada pertanian tanam paksa di era penjajahan dan mulai berkembang dengan pesat setelah masuknya sistem revolusi hijau di Indonesia tepatnya di Era pemerintahan zaman

orde baru. Sistem pertanian di negara Indonesia mulai diperbaiki dari mulai peraturan pola tanam, irigasi, pembagian sarpras penunjang pertanian dan penyuluhan pertanian yang didukung dengan adanya program berjangka sistem pembangunan lima tahun (Pelita) oleh pemerintah.

Revolusi Hijau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman budidaya khususnya di negara berkembang (Rinardi *et al.*, 2019). Pelaksanaan sistem Revolusi Hijau di Indonesia memberikan pengaruh positif bagi produktivitas tanaman pangan di Indonesia. Produksi beras telah meningkat dibandingkan dengan sebelumnya yang menjadikan bangsa Indonesia mengalami swasembada beras pada periode sekitar tahun 1980-an. Hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan pada sebuah negeri yang sebelumnya merupakan pengimpor beras terbesar di dunia. Modernisasi kemajuan teknologi di bidang pertanian ini membawa perubahan besar pada sektor pertanian, baik dari segi peralatan pertanian, maupun sikap sosial dan budaya masyarakat di pedesaan (Gultom and Harianto, 2021).

Sektor pertanian di Indonesia merupakan bidang utama yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi alam yang baik untuk dikembangkan dalam bidang pertanian. Manusia di dunia khususnya di Indonesia semakin lama semakin bertambah. Persediaan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga harus terjaga dan perlu ditingkatkan produksinya sehingga usaha dalam bidang pertanian akan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Beberapa usaha pemerintah dalam mendukung usaha bidang pertanian antara lain :

### **1. Pembuatan waduk di beberapa tempat di Indonesia**

Waduk merupakan tempat menampung air dengan volume jumlah yang sangat banyak yang mempunyai fungsi utama adalah

sebagai sarana irigasi di lahan persawahan sekitar waduk. Pada saat musim kemarau panjang tiba, air yang berasal dari waduk akan dialirkan ke daerah-daerah sekitarnya untuk mengairi tanaman agar diperoleh hasil panen yang maksimal. Fungsi lain waduk selain sebagai sarana pengairan adalah sebagai tempat wisata karena pemandangan waduk yang banyak akan air sangat mempesona mata yang melihatnya. Contoh waduk : waduk Gajah Mungkur di Wonorejo, waduk Malahayu di Brebes dan lain-lain.

## 2. Pembuatan saluran irigasi

Saluran air irigasi sangat bermanfaat bagi suplai pasokan air ke daerah-daerah yang membutuhkan. Saluran irigasi bisa berupa sungai besar dan sungai kecil (anak sungai). Misalnya: sungai Pemali di Brebes, sungai Bengawan Solo di Solo, sungai Cisanggarung di Brebes dan lain-lain.

## 3. Perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi lahan persawahan

Tempat lokasi lahan sawah memerlukan akses struktur jalan agar mudah dijangkau atau dilalui oleh petani, sarana input produksi pertanian, pengangkutan hasil panen dan lain-lain. Pada saat musim tanam tiba petani akan mengangkut sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan lain-lain. Musim panen tiba jalan akan dijadikan sarana pengangkutan hasil panen.

## 4. Subsidi pupuk bagi petani

Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan memberikan bantuan subsidi pupuk yaitu untuk jenis pupuk Urea ( $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ ) dan ZA ( $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ). Urea dan ZA merupakan pupuk yang mempunyai kadar nitrogen yang tinggi. Nitrogen merupakan unsur hara makro esensial yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Subsidi pupuk diharapkan dapat tepat sasaran untuk petani golongan menengah ke bawah yaitu dengan cara penggunaan kartu tani di beberapa daerah di Indonesia.

Adanya program kartu tani diharapkan kondisi ekonomi petani menengah ke bawah dapat terbantu.

#### **5. Penstabilan harga kebutuhan pangan**

Harga hasil panen merupakan tolok ukur petani menjadi semangat dalam bekerja atau tidak. Input faktor produksi yang tinggi namun hasil panen dengan harga yang rendah akan berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh petani. Harga hasil panen yang terlalu tinggi juga membuat para konsumen menjadi berkurang minat dalam pembeliannya. Oleh karena itu dibutuhkan penstabilan harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan operasi pasar.

#### **6. Penyaluran bantuan saprodi untuk petani melalui Gapoktan**

Kebutuhan sarana produksi seperti pupuk subsidi, benih hibrida, tractor, mesin pompa air dan lain-lain bagi petani sangatlah dibutuhkan, namun harga yang relatif tinggi membuat petani harus bisa memilih mana yang wajib diprioritaskan untuk diadakan atau tidak, hal ini dilakukan untuk dapat berhemat input faktor-faktor produksi. Penyaluran bantuan sarana produksi (Saprodi) oleh pemerintah kepada petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) melalui dinas pertanian diharapkan dapat membantu meringankan masalah petani dalam mempersiapkan input faktor-faktor produksi. Penyaluran saprodi diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian sehingga Indonesia dapat menjadi negara swasembada pangan.

#### **7. Kredit usaha rakyat (KUR)**

Penyaluran dana usaha tani melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan melalui koperasi atau BANK sangat diperlukan untuk membantu golongan petani ekonomi menengah ke bawah. Petani yang mengalami kekurangan modal dapat memanfaatkan KUR untuk menjalankan usaha taninya.

## 8. Tersedianya pasar

Pasar merupakan tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Kawasan pertanian yang difasilitasi adanya pasar akan membantu petani ataupun penjual untuk menjualkan hasil panennya ke tangan konsumen. Pasar merupakan salah satu syarat pokok yang harus tersedia dalam suatu kawasan apabila sektor pertanian ingin mengalami kemajuan dan perkembangan yang lebih baik.

## 9. Tersedianya tenaga fungsional penyuluh pertanian

Kegiatan penyuluhan tentang teknis pelaksanaan budidaya tanaman agar berjalan dengan baik sangatlah dibutuhkan oleh petani. Tenaga penyuluh pertanian dibawah kementerian pertanian ditugaskan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada setiap kecamatan di Indonesia. Penyuluh pertanian bertugas memberikan informasi atau pemahaman kepada petani mengenai teknologi dibidang pertanian untuk memperoleh hasil produksi yang maksimum dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimum dengan tetap menjaga kelestarian dan kesuburan tanah atau lingkungan.

Kemajuan pertanian sebagai adanya manfaat terjadinya revolusi hijau yaitu dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri ini memberikan manfaat dengan ditemukannya beberapa produk penunjang hasil pertanian (Febrianti *et al.*, 2021). Beberapa produk kemajuan teknologi yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia terkait dengan penerapan sistem Revolusi Hijau di Indonesia antara lain :

### 1. Mesin pengolahan tanah

Pengolahan tanah pada saat pertanian primitif atau tradisional (konvensional) menggunakan cangkul dan bajak yang ditarik oleh hewan kerbau atau sapi dan itu sangat membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan mesin modern sekarang yang menggunakan traktor. Pengolahan tanah dengan traktor dalam 1 ha sawah dapat diselesaikan kurang lebih 8 jam

sedangkan dengan tenaga manusia atau hewan yang menarik bajak disawah bisa selesai sampai berhari-hari dan itu sangat tidak efektif dan efisien.



Gambar 1. Mesin Traktor (modern)



Gambar 2. Bajak (Olah tanah konvensional)

## 2. Mesin penanaman padi

Penanaman tanaman padi (*Oryza sativa*) sejak zaman nenek moyang negara Indonesia belum merdeka pada umumnya menggunakan tenaga manusia (konvensional). Masyarakat saling gotong royong membantu untuk menanam padi di sawah dimusim tanam tiba. Revolusi hijau membawa kemajuan pada ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi membuat tenaga manusia tergantikan oleh mesin, yang mempunyai tenaga yang jauh lebih besar dan lebih cepat dalam bekerja sehingga lebih efektif dan efisien.



Gambar 3. Tanam Padi dengan Mesin



Gambar 4. Tanam padi konvensional (manual)

### 3. Benih unggul hibrida

Petani Indonesia sejak zaman dahulu dalam memperoleh bibit/biji tanaman untuk ditanam yaitu berasal dari hasil dari tanaman asal atau tanaman induk yang hasilnya disimpan dan suatu saat akan ditanam kembali sebagai bibit/benih. Kemajuan teknologi di zaman modern sekarang membuat manusia dapat berfikir untuk membuat benih unggul hibrida melalui proses persilangan sehingga diperoleh bibit tanaman dengan sifat-sifat yang unggul, misalnya berbuah banyak, tahan terhadap hama dan penyakit serta rasanya manis atau enak.



Gambar 5. Gambar benih padi hibrida

### 4. Pupuk kimia pabrikan

Input faktor produksi berupa pupuk pada zaman dahulu menggunakan pupuk organik atau sisa-sisa tanaman bahan organik untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun karena hara pada bahan organik mempunyai kadar yang sedikit menyebabkan tanaman menjadi rendah. Teknologi dalam revolusi hijau menghasilkan suatu teknologi pupuk kimia pabrikan yang memiliki kadar unsur hara yang tinggi yang dapat mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman sehingga produktivitas tanaman

menjadi tinggi. Pupuk kimia pabrikan Urea/ $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  memiliki kandungan nitrogen sebesar 46% dan pupuk kimia pabrikan ZA/ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  memiliki kandungan nitrogen sebesar 21%.



Gambar 6. Pupuk Urea



Gambar 7. Bahan Organik

## 5. Pestisida kimia pabrikan

Hama dan penyakit tanaman pangan (HPT) sangatlah merugikan bagi petani. Pengendalian HPT perlu dilakukan baik secara manual maupun dengan cara pemberian pestisida organik ataupun kimia pabrikan. Pertanian zaman dahulu nenek moyang masyarakat Indonesia hanya mengenal pengendalian secara manual saja yaitu mengambil hama yang menempel pada tanaman atau mencabut organ tanaman dan beberapa tanaman yang terserang hama atau penyakit sehingga tidak menular ke tanaman yang lain yang masih sehat. Namun penanggulangan HPT dengan cara manual akan mengalami masalah kerugian yang besar apabila serangan HPT yang terjadi dalam skala yang besar/luas dan dapat menimbulkan gagal panen. Kemajuan teknologi dalam bidang pertanian menghasilkan beberapa inovasi produk pestisida yang dapat mengendalikan HPT yang menyerang pada tanaman dalam skala kecil ataupun luas

sehingga dapat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian.

## **6. Herbisida**

Gulma merupakan tumbuhan pengganggu tanaman budidaya. Petani pada zaman dahulu (pertanian primitif atau konvensional) dalam mengendalikan gulma menggunakan tenaga manual yaitu dicabut dengan tangan atau dipotong dengan menggunakan parang kemudian dibakar. Pengendalian secara manual apabila dilakukan dalam area yang sangat luas membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak efektif efisien. Oleh karena itu perlu adanya cara pengendalian yang lebih mudah, praktis, efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dalam bidang pertanian pada zaman sekarang manusia telah menciptakan sebuah produk herbisida yang mampu mengendalikan gulma dalam waktu singkat, sistemik, efektif dan efisien. Penyemprotan herbisida pada gulma akan mengakibatkan gulma tersebut mati sehingga lahan akan bersih dari gangguan gulma yang tumbuh tidak manfaat disekitar lahan pertanaman. Contoh herbisida : Roundap, gramoxone dan lain-lain.

## **7. Mesin pompa air irigasi**

Air merupakan faktor produksi yang sangat vital dalam kegiatan budidaya tanaman. Sejarah pertanian di Indonesia khususnya kegiatan pengairan, petani melakukannya dengan membuat saluran saluran drainase menuju petakan sawah yang mereka kerjakan dan pada saat musim kemarau tiba petani akan mengalami masalah dalam memperoleh air karena saluran drainase yang kering tidak ada air. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakannya mesin pompa air yang tersalur pada sebuah sumur bor dibuat oleh petani diharapkan dapat membantu dalam mengairi lahan sawahnya walaupun musim kemarau sudah tiba. Mesin pompa air akan membantu petani mengairi sawah sehingga diharapkan petani dapat

menanam tanaman di sawah sepanjang tahun tidak terhalang oleh musim apa yang sedang berlangsung pada saat itu.



Gambar 8. Mesin pompa air (diesel)

#### 8. Alat pengendali hama tanaman.

Pengendalian hama tanaman selain dapat dilakukan dengan pestisida juga dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghambat laju hama untuk bisa mendekati tanaman. Pertanian pada zaman dahulu pengendalian hama dilakukan menggunakan alat yang masih sederhana / konvensional misalnya petani Indonesia menggunakan boneka orang-orangan sawah untuk menakuti burung agar tidak hinggap di tanaman padi, petani bawang merah mengendalikan hama kupu dengan menggunakan air pada saat penyiraman tanaman dan lain-lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pertanian pada zaman modern sekarang untuk mengendalikan hama burung dan kupu dilakukan dengan metode perangkap jaring sehingga hama tidak dapat mendekati tanaman pangan yang petani budidayakan. Pada tanaman bawang merah untuk mengendalikan hama kupu yang akan bertelur ke daun bawang merah juga dapat dilakukan dengan pemasangan lampu perangkap sehingga kupu pada malam hari lebih suka mendatangi lampu yang dibawahnya

sudah diberi perangkap cairan pestisida sehingga kupu yang hinggap dilampu dapat mati jatuh ke cairan tersebut.

## 9. Mesin panen

Petani dalam melakukan panen pada zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan era pemerintahan orde baru selalu menggunakan tenaga manusia atau manual. Pada saat panen padi tiba berbondong-bondong tenaga orang datang dengan menggunakan parang untuk memanen padi sehingga dalam 1 ha sawah dibutuhkan tenaga manusia sampai 20 orang/hari sehingga sangat tidak efektif dan efisien lagi untuk digunakan pada zaman modern sekarang ini karena tenaga manusia untuk bidang pertanian sangat sulit untuk diperoleh. Kemajuan teknologi diciptakannya mesin combine harvest (mesin panen padi) sangat membantu petani pada saat panen padi tiba. Dalam beberapa jam luasan panen padi 1 ha mampu dikerjakan sampai selesai dan sangat efektif untuk dilakukan.



Gambar 9. Panen padi menggunakan mesin



Gambar 10. Panen padi konvensional

## 10. Pupuk Hayati dan Organik

Penambahan unsur hara ke tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah sangatlah diperlukan untuk menunjang produktivitas tanaman yang sedang dibudidayakan oleh petani. Sejarah membuktikan bahwa nenek moyang masyarakat petani di Indonesia belum menggunakan pupuk dalam meningkatkan ketersediaan hara namun mereka (petani primitif) menggunakan

sistem ladang berpindah pada saat ladang sudah mulai tidak produktif. Perkembangan bioteknologi untuk bidang pertanian ditemukan pupuk hayati atau organik yang mampu meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah sehingga akan membantu ketersediaan hara sehingga akan mempertahankan atau meningkatkan kesuburan lahan dan produktivitas hasil panen di lahan tersebut. Penelitian – penelitian di lahan tentang pupuk organik dan pupuk hayati telah dilakukan oleh para peneliti baik dari mahasiswa di kampus perguruan tinggi negeri ataupun swasta serta badan penelitian di Indonesia seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Sebagai contoh telah ditemukan beberapa jenis bakteri pengoksidasi sulfur di sekitar rhizosfer tanaman bawang merah yang bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan sulfat di lahan seperti *Klebsiella variicola*, *Klebsiella aerogenes* dan *Burkholderia cepacia* (Juwanda *et al.*, 2020). Bakteri tersebut dapat dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk hayati. Contoh yang lain yaitu pemanfaatan limbah daun bawang merah menjadi kompos daun bawang merah yang dapat digunakan untuk penambahan bahan organik di lahan penanaman bawang merah. Kompos daun bawang merah merupakan bentuk inovasi teknologi terbaru untuk menambah bahan organik di dalam tanah (Juwanda *et al.*, 2022).

## Daftar Pustaka

---

- Febrianti, V.P. *et al.* (2021) 'Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi Padi', *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(2), pp. 54–60. Available at: <https://doi.org/10.31970/pangan.v6i2.50>.
- Gultom, F. and Harianto, S. (2021) 'Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani', *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), pp. 145–154. Available at: <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>.

- Gunawan, B. 2014. (2014) 4. *Buku Mekanisasi Pertanian\_Bg (1)*, Jaudar Press. Surabaya: CV Jauharoh Darusalam.
- Juwanda, M. *et al.* (2020) 'Soil properties and sulfur-oxidizing bacterial diversity in response to different planting patterns of shallot (*Allium ascalonicum*)', *Biodiversitas*, 21(6), pp. 2832–2839. Available at: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210661>.
- Juwanda, M. *et al.* (2022) 'The Long Composting Period Effect of Leaf Shallots on the Compost Quality', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1097(1). Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1097/1/012045>.
- Rifki, M. (2017) 'Ladang Berpindah dan Model Pengembangan Pangan Indonesia', in *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi 2017*, p. E22.1-E22.7.
- Rinardi, H. *et al.* (2019) 'Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes', *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), pp. 125–136. Available at: <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.21936>.
- Subroto, P. (1985) 'Sistem pertanian tradisional pada masyarakat Jawa tinjauan secara arkeologis dan etnografis', *Pelita*, pp. 1–104. Available at: <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/10921>.



## **BAB 2.**

# **MASALAH EKONOMI PERTANIAN**

*Oleh : Estherlina Sagajoka, SE., M.Si.*

### **Pendahuluan**

---

Ilmu Ekonomi pertanian adalah campuran dari ilmu ekonomi dan pertanian. Oleh karena itu, memahami makna ekonomi pertanian memerlukan kajian terlebih dahulu tentang ilmu ekonomi dan pertanian. Adam Smith adalah orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18. Melalui bukunya yang berjudul *Wealth of Nations*, beliau mencoba menggali sejarah perkembangan negara-negara Eropa. Perkembangan ilmu ekonomi dimulai dengan aliran klasik. Aliran ini, ini diprakarsai oleh Adam Smith, yang menekankan pada invisible hand dimana dalam mengatur distribusi sumber daya, dibutuhkan peran dan campur tangan pemerintah. Konsep ini beranggapan bahwa mekanisme pasar melalui harga merupakan instrumen utama, diharapkan agar pasar mampu bereaksi terhadap perubahan pasar saham. Sedangkan aliran Klasik, dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu dapat menciptakan

keadaan ekuilibrium, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mendistribusikannya. Dan memberi motivasi bagaimana membuat target yang pasti. Kedua arus ini kemudian saling bersaing dalam dunia ekonomi dan memunculkan banyak variasi dari keduanya seperti neoklasik, neokeynesian, dan monetaris. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tentang pengelolaan sumber daya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua pendekatan penting dalam ekonomi yaitu ekonomi positif dan normatif. Dapat juga dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk memperoleh materi yang cukup (Daniel, 2002). Tujuan mempelajari ekonomi adalah untuk mempelajari bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia bekerja, Ilmu Ekonomi mempelajari individu dan masyarakat dalam pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk produksi berbagai barang dan jasa dan alokasinya untuk kebutuhan konsumsi berbagai individu (sekarang dan di masa depan). Ekonomi mengkaji upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kekayaan. Latar belakang ekonomi adalah masalah pilihan, dimana kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya langka. Ekonomi adalah ilmu tentang kesejahteraan manusia. Posisi ini sangat realistis, karena dari sudut pandang ekonomi, manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakekatnya bermuara pada pencapaian kekayaan. Dalam buku "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776) karya pelopor liberalisme ekonomi, Adam Smith, kekayaan merupakan tujuan utama perekonomian. Secara umum, mata pelajaran ekonomi dapat dibagi dalam beberapa cara, yang paling dikenal adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selain itu, mata pelajaran ekonomi juga dapat dibagi menjadi mata pelajaran positif (deskriptif) dan normatif. mainstream dengan heterodoks dan lain-lain. Ekonomi juga berfungsi sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, ekonomi bisnis, dan manajemen. Teori ekonomi dapat digunakan di bidang selain kebijakan moneter,

seperti studi tentang perilaku kriminal, penelitian, kematian, politik, kesehatan pendidikan, keluarga, dan banyak lagi. Hal ini dimungkinkan karena ilmu ekonomi pada intinya adalah ilmu yang mempelajari pilihan-pilihan masyarakat. Gagasan dan metode ekonomi diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Analisis ekonomi berfokus pada pengambilan keputusan di berbagai bidang di mana orang menghadapi pilihan. Misalnya pendidikan, perkawinan, kesehatan, hukum, kejahatan, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago memprakarsai tren ini. Dia menjelaskan dalam artikelnya bahwa ekonomi tidak boleh ditekankan melalui subjeknya, melainkan sebagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku manusia. Banyak ekonom terkemuka percaya bahwa kombinasi teori dan pengetahuan yang ada sudah cukup untuk memahami fenomena di dunia. Ekonomi mengalami perubahan besar dalam gagasan, konsep, dan metode; meskipun kritikus merasa bahwa terkadang perubahan mendistorsi konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan realitas yang ada. Setiap individu harus memiliki kebutuhan,

untuk memenuhi kebutuhan hidup, individu secara rasional mempertimbangkan bagaimana menggunakan sumber daya atau pendapatan tertentu, sehingga penggunaan tersebut dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan maksimum kepada individu dan masyarakat. Kajian ini membutuhkan analisis ekonomi, yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: ekonomi deskriptif, teori ekonomi dan ekonomi terapan (applied economics). Teori ekonomi adalah pandangan yang menjelaskan sifat hubungan faktual/nyata antara aktivitas ekonomi dan prediksi peristiwa yang terjadi ketika keadaan yang mempengaruhinya berubah. deskripsi kegiatan ekonomi dan sifat hubungan ekonomi. Sumber daya yang terbatas seperti alat produksi, konsumsi, barang dan jasa mengarah pada pilihan rasional untuk memenuhi kebutuhan secara optimal. Orang di sini berarti produsen, konsumen dan pemilik faktor produksi. Karena sarana (sumber daya) kepuasan terbatas, orang harus berusaha untuk memaksimalkan kepuasan produsen dan konsumen. Karena

sumber daya yang dimiliki masyarakat terbatas atau langka, maka kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa menjadi terbatas. Masalah pilihan, yaitu. bagaimana metode menentukan penggunaan sumber daya produksi untuk opsi yang berbeda. Dengan demikian, satu jenis barang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan satu jenis saja. Misalnya, 1). tanah tidak hanya dapat digunakan sebagai alas bangunan, tetapi juga di sawah. 2). Sumber keuangan adalah barang yang terbatas, bahkan langka. Artinya, penggunaan dana harus cermat dan hati-hati. 3). Penggunaan uang. Uang dikatakan sebagai hal kedua setelah menentukan pilihan ekonomi untuk produksi. Meskipun uang penting dalam ekonomi, proses produksi tidak boleh berhenti tanpa adanya uang. Pembagian hasil produksi untuk konsumsi anggota masyarakat. Pembagian hasil produksi masyarakat kapitalis berbeda dengan pembagian hasil produksi masyarakat komunis. Dalam masyarakat kapitalis, barang didistribusikan melalui transaksi jual beli, dalam masyarakat komunis berdasarkan aktivitas dan kebutuhan.

## **Konsep Ekonomi Pertanian**

---

### **1. Pengertian Ekonomi Pertanian**

Definisi Ekonomi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisis penerapan ilmu ekonomi pada pertanian. kajian ekonomi yang membahas tentang fenomena dan subyek yang berkaitan dengan pertanian baik dalam ekonomi mikro maupun makro. Ekonomi Pertanian memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, geografi, politik, hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu pertanian berperan dalam proses pembangunan negara dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam analisisnya, Ekonomi Pertanian membutuhkan alat analisis yang dapat diperoleh dalam ilmu statistik, matematika, ekonometrika, dan logika. Ekonomi pertanian adalah ilmu yang memiliki manfaat besar dan penting dalam proses pembangunan

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ilmu pertanian meliputi analisis ekonomi proses produksi (teknis) dan hubungan sosial produksi pertanian, hubungan faktor produksi dan hubungan faktor produksi dan produksi itu sendiri. Kajian ilmu pertanian sarana atau faktor produksi dengan permasalahan, potensi dan kebijakan serta kemitraan, kelembagaan dan faktor pendukung lainnya diperlukan perencanaan yang matang sebelum melakukan proses produksi atau budidaya. Dalam ekonomi pertanian, semua ini dipertimbangkan dan dipelajari secara mendalam, atau faktor produksi beserta masalah, peluang dan kebijakannya, serta Dalam Ekonomi Pertanian, ekonomi produksi dan berbagai alat analisisnya memainkan peran yang lebih penting. Ekonomi Pertanian dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan usaha manusia yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan produksi. Ilmu pertanian mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi pada Ekonomi Pertanian sama pentingnya dengan Ekonomi dan Ilmu Pertanian itu sendiri. Ilmu pertanian tidak hanya merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dan ilmu pertanian, tetapi memiliki arti yang sangat penting bagi pertanian maupun ilmu ekonomi. Bidang ilmu pertanian berperan penting dalam pembangunan, kemajuan menempatkan petani pada masa reformasi tidak hanya sebagai peserta dalam pencapaian tujuan nasional. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mempercepat sumber daya untuk memperkuat ekonomi petani merupakan inti dari inisiatif pembangunan pertanian dipedesaan.

## **2. Hubungan ilmu Ekonomi dan Pertanian**

Penerapan ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas ekonomi pasar tentu melibatkan berbagai kegiatan baik pada tingkat ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Biasanya, ekonom produksi pertanian mempelajari permintaan input dan spesialis pemasaran pertanian terlibat dalam bidang pelatihan

yang berfokus pada rantai pemasaran dan harga pangan dan serat pada setiap tahap. Masalah pembiayaan pertanian terkait erat dengan ekonom yang terlibat dalam sumber daya pertanian. Pembangunan ekonomi merupakan perubahan struktural dari proses pembangunan dari strategi pembangunan nasional yang mengarahkan arah pembangunan daerah. Secara tradisional, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi. dimana, proses pembangunan ekonomi merupakan definisi terus menerus dari peran pertanian, industri dan sektor jasa maka harus dimulai dari daerah pedesaan , keadaan perekonomian di sektor pertanian cukup besar, sehingga strategi pembangunan ekonomi yang tepat adalah dengan mengutamakan sektor pertanian. Perubahan struktur perekonomian menunjukkan bahwa peran pertanian dalam pembangunan pertanian. Multifungsi pertanian meliputi perannya sebagai penghasil bahan pangan dan bahan mentah industri, pembangunan daerah dan pedesaan, penyangga di saat krisis, hubungan sosial ekonomi antara masyarakat di berbagai pulau dan daerah pertanian Indonesia terlihat pada abad ke-21 abad. sebagai sektor ekonomi, Sektor ini tidak lagi dapat berfungsi hanya sebagai aktor penolong atau tambahan dalam kaitannya dengan pembangunan Negara, seperti yang telah dibahas selama ini, tetapi harus menjadi aktor utama yang sesuai dengan industry. Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi sektor modern, sehingga industri hanya bisa bersaing dengannya. Sektor pertanian terbukti perannya dalam perekonomian nasional memiliki multiplier effect yang besar melalui keterkaitan input-output industri, konsumsi dan investasi. hasil pertanian yang sebagian besar berasal dari hasil perkebunan. Pengembangan ekspor sektor pertanian berfokus pada produk pertanian olahan jangka panjang yang memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional mendorong pembangunan sebagai kegiatan ekonomi, mata pencaharian dan cara untuk melindungi lingkungan sehingga sektor ini merupakan pembangunan yang unik.

Pertanian dapat berfungsi sebagai sektor ekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai faktor penting dalam industri yang terkait dengan pertanian. masalah pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan berdasarkan tiga perspektif, yaitu (1) masalah pertumbuhan yang timbul dari perbedaan antara pertumbuhan potensial yang dicapai dan tingkat pertumbuhan aktual yang dicapai; (2) masalah pertumbuhan ekonomi terkait dengan pertumbuhan potensi pertumbuhan itu sendiri dan (3) masalah pertumbuhan terkait dengan persistensi atau stabilitas pertumbuhan ekonomi Pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan sumber daya secara efektif di awal proses pembangunan menghasilkan surplus ekonomi melalui pembentukan tenaga kerja dan modal, untuk berinteraksi dengan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan ternak. untuk produksi produk primer yaitu bahan makanan dan serat alam (Koerniawati, 2009)

## **Masalah Ekonomi Pertanian**

---

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam struktur pembangunan ekonomi di Negara berkembang. Perkembangan pembangunan pertanian saat ini belum optimal, hal ini dilihat dari tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani dan kontribusinya pada Pendapatan Nasional Bruto. Namun pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peranan penting, karena jumlah penduduk Indonesia sebagian besar bekerja disektor pertanian. Peranan industri menjadi pemasok pangan bagi masyarakat dan basis pertumbuhan desa. Potensi pertanian Indonesia memang besar, namun kenyataannya petani kita masih banyak memiliki pendapatan rendah, dan masuk kategori kelompok miskin, Karena sering kali para petani diperhadapkan dengan berbagai masalah yang rumit dan permasalahan tersebut justru akan memberikan dampak kerugian yang besar bagi para petani dan masalah tersebut

terjadi hampir setiap tahun dan masih menjasi misteri dalam penyelesaiannya., masalah ini kadang terjadi menahun dan berkepanjangan. Stigmatisasi masyarakat yang masih menganggap sektor pertanian hanya berujung kepada mencakul saja, pertanian itu jorok dan miskin , pandangan ini didasari karena tidak adanya bukti yang kuat yang dapat menjanjikan walaupun tidak semua petani itu miskin , namum kebanyakan taraf prerkonomian para petani masih termasuk kelas menengah kebawah. Krissis regenerasi petani Muda, rendahnya minat generasi muda untuk terjun kedunia pertanian. Data statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk bangsa Indonesia yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 38.7 juta jiwa dengan rata-rata usia  $\geq 45$  tahun. Padahal generasi muda adalah generasi penerus sekaligus merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian. Jika tidak segera diatasi atau di tangani secara serius akan berdampak pada sulitnya mencapai ketahanan pangan nasional, yang merupakan salah satu program yang sedang digerakan adalah modernisasi pada sektor pertanian sehingga tampak lebih baik. Pertanian digital merupakan alternative bisnis yang menarik untuk mengubah citra pertanian menjadi bisnis yang menjanjikan. Teknik budidaya dan teknik bertani tepat guna dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman, dan jarang sekali petani diindonesia yang berasal dari kalangan terdidik yang sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pertanian seperti pemberian pupuk yang sesuai, penanganan hama, dan proses pengolahan pasca panen yang dilakukan sehinggga dapat memberikan nilai tambah dari produk hasil pertanian tersebut, Sehingga pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluh pertanian. Menurut Reyna. V. Nona dalam Book Chapter Ekonomi pembangun Strategi dan kebijakan (Pembngunan Pertanian) (hal 150), bahwa kelembagaan Tani memiliki peranan penting dalam pembangunan sector pertanian karena kelembagaan tani berperan sebagai perantara yang menjembatani kebijakan dan program pemerintah terkait pelaku maupun obyek di sektor pertanian seperti

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) dan Kelompok Tani (Poktan). Kelembagaan tani juga merupakan tempat berkumpulnya para petani dalam membangun dan mengembangkan kegiatan pertanian secara bersama, kelembagaan tani juga merupakan mitra dari penyuluh pertanian . Karena tak jarang ditemukan dilapangan bahwa penyuluh pertanianpun kurang memahami atau menguasai masalah pertanian karena petugas penyuluhan yang direkrut bulah dari basik ilmu pertanian sehingga para petanipun bersikeras dengan pengetahuan yang mereka miliki. Faktor modal usaha tani juga yang membuat petani kesulitan dalam melakukan usaha tani sektor pertanian, Usaha tani tidak mampu memberikan kepastian yakni tergantung pada alam dan musim , yang menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan uang kepada wirausahawan bidang pertanian. Karena sektor pertanian memiliki kelemahan di masa lalu, yaitu hanya fokus pada pertanian, lemahnya dukungan politik makro, dan pendekatan terpusat. Akibatnya, usaha pertanian Indonesia didominasi oleh usaha dengan (a) volume kecil, (b) modal terbatas, (c) teknologi sederhana, (d) dipengaruhi oleh musim, (e) ) area pasar bersifat lokal , (f) bekerja dengan pekerjaan keluarga yang mengarah ke involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses ke kredit, teknologi dan pasar sangat rendah , (h) pasar pertanian didominasi mono-/oligopsonik besar pedagang yang mengarah pada eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, di Indonesia juga terdapat permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian, seperti reformasi pertanian yang mengalihkan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang tidak terkendali, kurangnya benih berkualitas bagi petani, kelangkaan. penggunaan pupuk pada musim tanam, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan pelanggaran hak asasi petani, meminta pemerintah lebih serius lagi dalam menyelesaikan masalah pertanian di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan pertanian maju dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## Tantangan dan Pemecahan Masalah Ekonomi Pertanian

---

Pembangunan dan pemecahan masalah ekonomi pertanian mesti diperhadapkan pada masalah bagaimana menghadapi gejala perubahan tatanan politik, bangsa Indonesia menuju demokratisasi, dan tuntutan otonomi daerah, tantangan bagaimana mencegah perubahan tatanan dunia yang mengarah pada era globalisasi, sehingga pembangunan pertanian Indonesia diperlukan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, dan untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera. Ketiga tantangan tersebut harus diupayakan secara serius, agar pertanian dapat menjadi penggerak perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penggerak pembangunan bangsa. Meskipun perubahan tersebut struktur ekonomi telah membuat Indonesia semakin menunjukkan tanda-tanda menuju negara industri, tidak salah untuk berpikir bahwa Indonesia masih merupakan bagian dari negara agraris . Setidaknya ada dua alasan. . mengapa negara ini masih dianggap sebagai lahan pertanian atau pertanian. Pertama, sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia, terbukti dengan pangsaanya sebesar masih cukup tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan lain, yang sebagian besar adalah sekitar 33% (2, 7 juta), adalah 15 penduduk usia kerja atau lebih yang bergantung pada sektor pertanian. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, masih banyak 66 permasalahan pertanian di Indonesia yang menyebabkan sektor pertanian tidak berkembang seperti pertanian di negara lain (Setiawan, 2013). Berikut ini diuraikan antara lain cara mengatasi masalah pertanian Indonesia :

1. Mengoptimalkan program pertanian organik Indonesia secara keseluruhan dan mensyaratkan pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif dan ramah lingkungan.

2. Mengatur perubahan tanah dengan menetapkan bidang tanah tetap yang keberadaannya dilindungi undang-undang
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pertanian.
4. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal
5. Pelaksanaan swasembada pangan.
6. Peningkatan kualitas penyuluh pertanian
7. Pengembangan dan penegakan hukum yang melindungi hak asasi manusia Petani.
8. Menempatkan pejabat dan pegawai kantor pada masing-masing instansi atau instansi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidangnya.
9. Implementasi Reforma Agraria Sekarang.
10. Keseimbangan kandungan informasi terkait dunia pertanian dan konseptualisasi jam tayang khusus dunia pertanian publikasi di semua media yang tersedia.
11. Peningkatan pendampingan bagi lulusan pertanian terpadu melalui pertumbuhan agribisnis (inkubator bisnis), pendidikan keterampilan dan praktik hidup (reintroduksi), keterampilan bisnis dan kemandirian usaha, program pelatihan dan generasi pemegang muda.
12. Pemusnahan massa pertanian.

## Penutup

---

Berdasarkan uraian permasalahan Ekonomi Pertanian diatar maka kebijakan untuk pengembangan sektor pertanian diperlukan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi permasalahan di masing-masing daerah. Wilayah satu dengan wilayah yang lain tidak memiliki permasalahan yang sama sehingga diperlukan adanya pengkajian tentang alur kebijakan agar dapat sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan dalam sektor pertanian. Setiap daerah agar membuat kebijakan yang tidak

harus sama namun disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Dapat pula agar pemerintah memberikan kebijakan pertanian untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan sektor pertanian di Indonesia. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan dalam pembuatan kebijakan dalam rangka untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Kebijakan yang dibuat agar lebih difokuskan untuk menjadikan pertanian berkelanjutan dengan mengikuti aspek teknologi. Selain itu perlunya pemerintah untuk melakukan sosialisasi di berbagai terhadap masyarakat khususnya petani bahwa pentingnya untuk mengikuti segala pemanfaatan dan upaya pengolahan dengan menggunakan metode yang sudah mengarah pada pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi.

## Daftar Pustaka

---

- Arifin STP. MP. 2015 , Pengantar Ekonomi Pertanian , Bandung . Cv. Mujahid Press.
- Ismi Imania Ikhsanil. Et all. 2020; Arah dan Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Vol. V Nomor 2.
- Reyna V. Nona .2023. Bunga Rampai *Ekonomi Pembangunan (Strategi dan Kebijakan); Pembangunan Pertanian* . Bandung Jawa Barat : Media Sains Indonesia



## **BAB 3.**

# **FAKTOR-FAKTOR KELEMBAGAAN DALAM EKONOMI PERTANIAN**

*Oleh : Gontom Citoro Kifli*

### **Lembaga Ekonomi Pertanian**

---

Ekonomi pertanian diartikan sebagai ilmu sosial terapan yang berhubungan dengan bagaimana produsen, konsumen, dan masyarakat menggunakan sumber daya yang langka dan alami dalam produksi, proses, pemasaran, dan konsumsi produk makanan dan serat (Penson et al., 2021). Ekonomi pertanian berkembang dari dua disiplin ilmu, yaitu pertanian dan ekonomi. Pertanian merupakan komoditas penting di banyak negara, karena hal ini menyangkut hal mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, yaitu makanan. Hal ini akan sangat penting dan lebih kritis bagi negara-negara dengan penduduk banyak, terutama di beberapa negara berkembang (Texas et al., 2021).

Definisi singkat dari ekonomi pertanian menunjukkan bahwa bidang pertanian sebagai sebuah sistem dari hulu hingga hilir, memiliki peran yang penting dalam perekonomian, baik dalam

tatanan makro dan mikro. Pangan sebagai fokus utama dalam bidang pertanian, merupakan kebutuhan primer masyarakat, yang harus dipenuhi setiap harinya, sehingga pengaturan atau manajemen ekonomi dalam pemenuhan pangan tersebut menjadi sangat penting.

Sistem ekonomi pertanian memerlukan suatu pengelolaan atau manajemen agar proses yang berjalan dalam sistem tersebut berjalan baik dan lancar, sehingga sistem dapat mendukung kehidupan ekonomi pertanian. Salah satu pendukung dari sistem ekonomi pertanian tersebut adalah lembaga ekonomi pertanian.

Lembaga ekonomi pertanian merupakan sebagai suatu bentuk, wadah, organisasi, kelompok yang mengatur dan berhubungan dengan kegiatan pertanian yang meliputi proses produksi dan konsumsi, sehingga dari kegiatan tersebut menghasilkan nilai-nilai ekonomi, seperti pendapatan ekonomi. Putsenteilo et al (Putsenteilo et al., 2020) menjelaskan bahwa lembaga ekonomi pertanian merupakan sistem sosial ekonomi pertanian yang meliputi ekonomi, organisasi, legal, moral dan etika.

Kelembagaan ekonomi pertanian secara umum, dapat dibedakan menjadi empat faktor kelembagaan ekonomi, yaitu; 1) kelembagaan produsen, 2) kelembagaan perantara, 3) kelembagaan konsumen, dan 4) kelembagaan regulasi.

### **1. Kelembagaan ekonomi produsen**

Produsen komoditas pertanian di Indonesia, sebagian besar adalah para petani, sehingga lembaga ekonomi produsen adalah lembaga yang mengelola perekonomian di tingkat petani. Terdapat beberapa lembaga ekonomi pertanian pada tingkat petani saat ini atau dengan istilah Kelembagaan Ekonomi (KEP), seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/ 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, KEP didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik

yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016).

Lembaga ekonomi produsen pertanian, dapat berbentuk koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Perseroan Terbatas, atau dalam bentuk korporasi petani. Lembaga ekonomi pertanian di tingkat petani, tidak terlepas dari lembaga yang mewadahi petani tersebut, yang umumnya dalam bentuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Definisi kelompok tani menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016).

Korporasi petani merupakan bentuk baru, seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018), yang menjelaskan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Korporasi petani merupakan bentuk usaha ekonomi alternatif yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang pasti, rutin dan berkesinambungan, karena salah satu kelebihan dari korporasi petani bahwa korporasi petani merupakan gabungan dari beberapa koperasi atau badan usaha di tingkat petani, sehingga

dapat mengkonsolidasi aset dan perputaran modal dan usaha secara maksimal.

Korporasi petani juga menjadi alternatif untuk pengembangan ekonomi petani dan kelompok-taninya dengan mengkonsolidasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki para petani (Hermanto et al., 2019). Korporasi petani dikelola secara profesional untuk kepentingan ekonomi dan juga sosial kelembagaan petani, sehingga kelembagaan ekonomi petani dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan lembaga usaha ekonomi petani tersebut, dan dijalankan secara bertahap, hingga pada akhirnya dapat menjadi korporasi petani yang besar, profesional, dan menguntungkan bagi petani.

Lembaga ekonomi produsen pertanian saat ini yang mengalami perkembangan selain korporasi petani adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha masyarakat Desa (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021). BUMDes berlokasi di daerah pedesaan, dan sebagian besar penduduk pedesaan tersebut adalah petani, sehingga BUMDes sebagian besar memiliki layanan usaha di bidang pertanian, seperti penyediaan sarana produksi pertanian, penyewaan alat dan mesin pertanian, simpan pinjam untuk keperluan pengembangan pertanian anggotanya.

Hal yang penting dari lembaga ekonomi produsen tersebut adalah adanya keuntungan ekonomi atau finansial maupun non finansial. Keuntungan finansial berupa nilai uang yang diterima seperti dari sisa hasil usaha, laba, sedangkan keuntungan non finansial berupa kemudahan akses mendapatkan sarana produksi

pertanian, informasi, serta kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Lembaga ekonomi produsen pertanian dapat juga dibedakan dengan status dari lembaga ekonomi tersebut, termasuk di tingkat petani, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Beberapa keuntungan dari berbadan hukum, yaitu; 1) pemiliknya terlindungi dari tanggung jawab hukum yang terkait dengan operasional usaha, dan terbatas kepada modal yang disetor kepada lembaga usaha tersebut, 2) akan lebih mudah mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan, pemerintah, investor, dan pihak lainnya, 3) kelangsungan hidup lembaga ekonomi tersebut relatif akan bertahan lama walaupun terjadi pergantian pemilik atau anggota, 4) memiliki kredibilitas dan profesionalisme, sehingga menarik pihak-pihak terkait untuk berinvestasi atau melakukan kerja sama ekonomi.

Kekurangan dari berbadan hukum, diantaranya 1) pembentukan badan hukum memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama dan cukup besar, 2) terikat dan harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku, seperti pelaporan usaha secara rutin dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, 3) keuntungan yang diperoleh dibagi antara pemilik dan anggota, sesuai dengan persentase yang disepakati dan berlaku, sehingga hal tersebut dapat membatasi pengembangan usaha, 4) pengambilan keputusan untuk suatu permasalahan atau hal penting lainnya dapat lebih lama dan relatif rumit, karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dan hak suara.

## **2. Kelembagaan ekonomi perantara**

Lembaga ekonomi perantara pertanian merupakan lembaga yang berada di antara lembaga produsen dan lembaga konsumen. Lembaga ekonomi tersebut umumnya merupakan lembaga yang melakukan pengolahan, proses, dan melakukan perubahan bentuk produksi yang dihasilkan lembaga produsen dari mentah

menjadi produk olahan, yang selanjutnya dijual atau dipasarkan kepada konsumen atau lembaga ekonomi konsumen.

Lembaga ekonomi tersebut umumnya merupakan lembaga ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kuantitas UMKM di Indonesia terus bertambah dan berkembang saat ini. Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 mencatat bahwa jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 4.162.688 unit usaha, dan persentase terbesar dari UMK tersebut, sebesar 1.542.410 unit usaha adalah di bidang makanan atau pangan. Satu Usaha Mikro memiliki 1 hingga 4 orang pekerja, dan satu Usaha Kecil memiliki 5 hingga 19 orang pekerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Unit usaha makanan sebagian besar merupakan unit usaha yang mengelola, mengolah, memproses hasil produksi pertanian, baik komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga ekonomi perantara pertanian memiliki porsi dan peran penting dalam perekonomian nasional.

Lembaga ekonomi perantara ini memiliki posisi strategis dalam menyerap hasil produksi pertanian dari lembaga ekonomi produsen pertanian, dengan cara memenuhi penawaran produksinya, yang selanjutnya dilakukan diversifikasi produk olahan dan kemasan dari komoditas pertanian yang diterimanya. Kondisi tersebut memberikan dampak berupa; 1) produk pertanian yang dijual atau ditawarkan lembaga produsen pertanian ke pasar tidak akan terjadi kelebihan produksi atau *over-production*, 2) harga produk pertanian yang dijual lembaga ekonomi produsen tidak akan mengalami harga rendah (jatuh), karena dapat terserap oleh lembaga ekonomi perantara.

### **3. Kelembagaan ekonomi konsumen pertanian**

Konsumen sebagai target dan pengguna akhir dari produk-produk pertanian, baik berperan sebagai perseorangan atau pribadi dan sebagai lembaga, memiliki peran yang penting dalam berlanjut atau tidaknya mengonsumsi produk yang telah

digunakan atau dikonsumsi, sehingga bila konsumen tidak melanjutkan untuk membeli, mengonsumsi atau menggunakan produk di masa selanjutnya, maka hal ini menjadi kerugian bagi produsen dalam menjual produknya, sehingga secara langsung akan mempengaruhi pendapatan produsen tersebut.

Hal yang penting bagi produsen pertanian dalam menjaga kesinambungan penjualan produknya, yaitu dengan memperhatikan kepuasan konsumen terhadap produknya. Kepuasan konsumen secara sosial dan ekonomi telah diatur dalam beberapa regulasi mengenai perlindungan konsumen (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1999, 2001), termasuk perlindungan konsumen terhadap produk-produk peternakan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa konsumen produk peternakan memiliki hak untuk mendapatkan produk peternakan yang ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 2014a).

Beberapa regulasi tersebut memuat ketentuan-ketentuan bagi produsen atau pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dijual dan ditawarkannya layak, aman, sehat bagi konsumennya, sehingga dalam regulasi tersebut, konsumen terlindungi secara hukum. Konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Selain hak untuk mendapatkan produk yang layak, aman, sehat, utuh, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dari produk tersebut, hak untuk dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apabila terjadi masalah dari produk tersebut. Namun demikian, konsumen memiliki kewajiban juga, yaitu; mengikuti petunjuk produk, membayar sesuai ketentuan atau kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian

hukum apabila terjadi masalah transaksi (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1999).

Upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya, selain menerbitkan dan mengawasi regulasi terkait, juga mendorong adanya lembaga independen yang melindungi kepastian hukum konsumen, berupa lembaga perlindungan konsumen swadaya non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Salah satu lembaga independen yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI memiliki tugas untuk menjalankan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Terdapat regulasi khusus dalam menentukan halal suatu produk, terutama untuk produk makanan, yang termasuk produk yang dihasilkan oleh lembaga ekonomi produsen dan perantara pertanian. Produk tersebut harus mendapatkan sertifikat kehalalan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang menguji kehalalan produk, serta bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan kehalalan produk (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 2014b). Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPJPH, untuk menjamin kehalalan produk secara islami yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

#### **4. Kelembagaan regulasi ekonomi pertanian**

Lembaga regulasi ekonomi dalam bidang pertanian, yaitu lembaga yang mengatur regulasi hal-hal yang terkait dengan

bidang pertanian, dalam hal ini yaitu pemerintah dengan kementerian-kementerian terkait dalam pengaturan ekonomi pertanian. Beberapa kementerian yang erat kaitannya dengan regulasi bidang ekonomi pertanian, yaitu kementerian pertanian dan kementerian perdagangan.

Peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi pertanian terdapat dalam kebijakan fiskal atau keuangan, dan pemasaran produk pertanian, termasuk penguatan jaringan pemasaran antar daerah dan melakukan sinkronisasi para pelaku sektor ekonomi pertanian. Selain itu, hal penting lainnya adalah kesesuaian dan kesepahaman kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah (Wardhono and Wibowo, 2020). Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi pertanian melalui regulasi, subsidi, insentif, dan program-program lainnya. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi ketersediaan input, harga produk pertanian, dan akses pasar bagi petani.

Kebijakan pemerintah dalam ekonomi pertanian, dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pertanian dan mendorong keberpihakan kepada petani, dalam hal; 1) sistem perdagangan, yaitu dengan mengatur ketersediaan komoditas pertanian di pasar, seperti dilakukannya operasi pasar, pasar murah dan sejenisnya pada saat terjadi kelangkaan barang tersebut di pasar, 2) Memberikan fasilitas kemudahan akses dan informasi, baik akses mendapatkan sarana produksi, maupun akses informasi harga dan kondisi pasar, seperti diberikannya subsidi pupuk, ketersediaan informasi melalui media sosial dan sejenisnya, 3) sistem pembiayaan, untuk membantu petani mengakses perbankan untuk mengembangkan pertanian petani. Bentuk dukungan tersebut seperti adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian, dan 4) Inovasi teknologi pertanian, terutama melalui penyuluhan pertanian dan fasilitas pendukungnya, serta melalui internet. Inovasi teknologi

dan inovasi kelembagaan merupakan hal yang penting dan menentukan dalam menentukan keberhasilan petani dalam berusaha taninya, sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih baik, apabila dibandingkan tanpa menggunakan inovasi teknologi pertanian dan dukungan penyuluhan pertanian.

## **Sistem Pendukung (*Supporting Systems*) Kelembagaan Ekonomi Pertanian**

---

Faktor-faktor kelembagaan ekonomi pertanian merupakan hal yang dinamis, yang berarti dapat mendukung atau mendorong lembaga ekonomi tersebut secara penuh, sehingga menghasilkan peningkatan atau pengembangan dari fungsi lembaga tersebut sesuai tujuan lembaga, namun juga sebaliknya, tidak mendukung atau melemahkan lembaga tersebut, sehingga diperlukan kondisi yang menjadikan fungsi tersebut berjalan baik dan mendukung kelembagaan tersebut.

Beberapa sistem pendukung tersebut adalah 1) Manajemen, 2) budaya organisasi, 3) pemanfaatan internet (IoT) Manajemen, secara sederhana dapat diartikan sebagai proses atau tindakan yang berurutan dari perencanaan, pelaksanaan dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Manajemen merupakan suatu sistem yang sirkuler atau berputar terus menerus, yaitu setelah pelaksanaan dilakukan dan dilakukan evaluasi, maka hasil dari evaluasi tersebut dilakukan kembali perencanaan, sehingga senantiasa terjadi perbaikan dari kegiatan di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Manajemen diterapkan pada organisasi yang kecil hingga besar. Koperasi petani atau korporasi memerlukan manajemen, sesuai kerumitan organisasi tersebut, namun hal yang penting adalah dilaksanakannya proses manajemen tersebut. Kelengkapan dari koperasi petani, KUB, korporasi petani seperti; Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, struktur organisasi, dewan pengawas, rapat rutin, dan lainnya menunjukkan bahwa masing-masing peran/ kegiatan memiliki tugasnya yang harus dijalankan dengan baik,

sehingga proses manajemen berjalan lancar untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi.

Manajemen dari kelembagaan ekonomi yang besar, memerlukan program yang komprehensif dalam mendukung sistem manajemennya. Terdapat sedikitnya sepuluh program guna meningkatkan sistem manajemen dalam suatu lembaga ekonomi atau perusahaan yang besar, yaitu; perencanaan dan kontrol, pelaksanaan, pembiayaan dan pengurangan biaya, peningkatan kualitas, pengukuran usaha, percepatan respon, peningkatan fleksibilitas, komunikasi dan Teknologi Informasi, program terpadu, program manajemen (Crandall and Crandall, 2015). Selain itu, terdapat hal baru yang berkembang dalam ilmu manajemen, yaitu manajemen pengetahuan atau Knowledge Management, yang diartikan suatu pengelolaan pengetahuan, khususnya yang asset tidak terlihat/*intangible asset*, yang selama ini jarang diperhatikan dalam manajemen, yaitu; reputasi, kekayaan intelektual, hubungan pelanggan, keragaman dan bakat pegawai, kemampuan bekerja dengan aman dan berkelanjutan (Milton and Lambe, 2020)

Budaya lembaga merupakan hal yang penting dalam lestari dan berlanjutnya suatu lembaga atau organisasi, termasuk dalam lembaga ekonomi (Howard- et al., 2022). Budaya dari lembaga tersebut merupakan ciri atau karakter yang membedakan lembaga ekonomi tersebut dengan yang lainnya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi lembaga ekonomi produsen, maupun perantara, karena di dalamnya terdapat karakter dari lembaga tersebut.

Lembaga ekonomi pertanian memerlukan adaptasi dengan perkembangan kondisi saat, seperti kondisi berkembang pesatnya penggunaan penggunaan internet, yang sudah mencakup ke berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia atau diistilahkan dengan Internet of Thing (IoT). Penggunaan internet di dalam mengembangkan usaha dan perekonomian, menjadi keniscayaan dan tidak dapat dihindarkan. Perkembangan terkini dalam pemanfaatan internet

dan perangkat pendukungnya saat ini adalah digunakannya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.

AI menjadi penting dalam iklim usaha saat ini, saat semakin berkembangnya perdagangan secara online (*e-commerce*). Penggunaan internet dalam aspek AI, akan sangat berguna pada proses marketing dari produk-produk yang dijual (Howard- et al., 2022). Lembaga ekonomi pertanian sebagai lembaga bisnis, maka sangat berkepentingan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan internet secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

## Daftar Pustaka

---

- Badan Pusat Statistik, 2023. Profil Industri Mikro dan Kecil 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Crandall, R.E., Crandall, W.R., 2015. How Management Programs Can Improve Performance. Information Age Publishing, Inc., California.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Indonesia.
- Hermanto, Syahyuti, Simatupang, P., Susanto, H., Noviati, Anggraini, T., Sativa, M., Hadikusumo, K., Senoadji, T., 2019. Grand Design Pengembangan Korporasi Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Pertanian untuk Kesejahteraan Petani. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Howard-, J.G., Grenville, Gapp, T., 2022. Organizational culture for sustainability, in: Gerard, G., Haas, martin R., Joshi, H., McGahan, A., Tracey, P. (Eds.), Handbook on the Business of Sustainability The Organization, Implementation, and Practice of Sustainable Growth. Edward Elgar Publishing, Massachusetts 01060, pp. 138–150. <https://doi.org/10.4337/9781839105340>

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 2014a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 2014b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Indonesia.
- Milton, N., Lambe, P., 2020. *The Knowledge Manager's Handbook*, second. ed. KoganPage, New York.
- Penson, J.B., Rosson, C.P., Woodward, R.T., 2021. What Is Agricultural Economics?, in: *Introduction to Agricultural Economics*. Pearson, Texas, pp. 1–15.
- Putsenteilo, P., Klappiv, Y., Karpenko, V., Gvozdecka, I., 2020. The role of institutions in the development of agriculture. *Bulg. J. Agric. Sci.* 26, 23–33.
- Texas, J.B.P., Capps, O., Texas, P.R., 2021. *Introduction to Agricultural Economics*, 7th edition.
- Wardhono, A., Wibowo, R., 2020. *Institutional Arrangement of Agriculture Development in Indonesia : Lesson Learn from*

Korea through 6th Order of Industrial Agriculture System, in:  
E3S Web of Conferences, ICALS 2019.



## **BAB 4.**

# **FAKTOR PRODUKSI TANAH DALAM EKONOMI PERTANIAN**

*Oleh : Dwi P. Widiastuti*

### **Ekonomi Pertanian**

---

Ekonomi pertanian memiliki konsep sintesis dari ilmu ekonomi dan ilmu pertanian. Apabila dijabarkan, ekonomi pertanian memiliki arti suatu ilmu yang mempelajari, membahas, dan menganalisis pertanian dari segi ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diimplementasikan pada bidang pertanian ((Daniel, 2004); (Arwati, 2018)).

Konsep ilmu pertanian di sini dapat diartikan sebagai ilmu pertanian dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup ilmu yang mempelajari tentang bercocok tanam, akan tetapi ilmu yang mempelajari segala sesuatu dalam kaitannya dengan pertanian, yaitu dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan ((Arifin, 2015); (Arwati, 2018)).

(Mosher, 1966) mendefinisikan pertanian sebagai intervensi manusia dalam pengembangan tanaman atau hewan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kehidupan keluarga dan masyarakat. Intervensi manusia terjadi melalui pengorganisasian sumberdaya

internal dan eksternal dan penggunaannya untuk peningkatan produksi dengan intensifikasi atau ekstensifikasi, diversifikasi, efisiensi usahatani, perbaikan mutu, pengolahan limbah, perbaikan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Ilmu ekonomi pertanian memiliki manfaat besar dan berperan penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi pertanian meliputi analisis ekonomi dari proses produksi (teknis) dan hubungan sosial dalam produksi pertanian, hubungan antar faktor produksi, serta hubungan antara faktor produksi dan produksi itu sendiri ((Arifin, 2015); (Arwati, 2018)).

## **Faktor Produksi**

---

Menurut (Arifin, 2015), produksi adalah kegiatan menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Selain itu, arti lain dari produksi adalah hasil akhir dari suatu proses atau kegiatan ekonomi menggunakan beberapa input atau masukan ((Assauri, 2008)).

Kegiatan produksi tidak dapat dilakukan jika tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Dengan pengertian ini, kegiatan produksi didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan output dengan cara memproses input dengan menggunakan teknik produksi tertentu ((Assauri, 2008)).

Manusia membutuhkan tenaga kerja, sumberdaya alam, modal, dan keahlian untuk dapat melakukan kegiatan produksi ((Assauri, 2016)). Semua elemen tersebut dikenal dengan faktor-faktor produksi. Dengan demikian, faktor produksi adalah semua unsur yang mendukung usaha penciptaan nilai atau usaha untuk meningkatkan nilai barang.

Menurut (Arifin, 2015); (Sumarni & Soeprihanto, 1995), pengertian faktor produksi adalah benda-benda yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang dapat digunakan dalam produksi barang dan jasa. Faktor produksi dalam pertanian adalah semua pengorbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman itu

tumbuh/berkembang dan memiliki hasil yang memuaskan ((Arifin, 2015); (Maulidah, 2012)).

Faktor produksi menentukan besarnya produksi yang dicapai. Ketersediaan sarana atau faktor produksi (input) tidak berarti produktivitas petani tinggi. Akan tetapi, kapasitas petani mengelola usahatani secara efektif sangatlah penting. Efisiensi teknis tercapai bila petani dapat mengelola faktor produksi untuk mencapai produksi yang tinggi ((Maulidah, 2012)).

Faktor produksi merupakan input bagi proses produksi pertanian. Proses produksi pertanian adalah proses yang memadukan faktor-faktor produksi pertanian untuk menghasilkan produk pertanian ((Ahyari, 2002); (Daniel, 2004)).

Salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam ekonomi pertanian adalah faktor alam ((Daniel, 2004); (Suratiah, 2008)). Faktor alam digolongkan menjadi dua, yaitu faktor tanah (land) dan lingkungan alam sekitarnya.

## **Faktor Produksi Tanah dalam Ekonomi Pertanian**

---

Tanah memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam sektor pertanian. Secara keseluruhan, harga tanah memainkan peran penting dalam ekonomi pertanian. Hal ini mempengaruhi biaya produksi, pendapatan, investasi, dan kemampuan petani untuk mengakses pembiayaan ((Ihsannudin et al., 2016)).

Dalam rangka memanfaatkan potensi ekonomi tanah, penting bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk memperhatikan nilai dan produktivitas tanah, serta mempertimbangkan faktor ekonomi yang terkait dengan tanah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ((Putra et al., 2013)). Oleh karena itu, pemahaman tentang nilai ekonomi tanah sangat penting bagi para petani dan pelaku industri pertanian lainnya.

Berikut ini adalah beberapa aspek dimana nilai ekonomi tanah dapat mempengaruhi sektor pertanian:

1. **Biaya Produksi.** Harga tanah dapat mempengaruhi biaya produksi dalam pertanian. Petani harus mempertimbangkan biaya perolehan atau sewa tanah saat menghitung biaya produksi yang dibutuhkan untuk pertanian. Semakin tinggi harga tanah, semakin tinggi biaya produksi yang harus ditanggung petani. Oleh karena itu, harga tanah yang tinggi dapat berdampak pada profitabilitas usaha pertanian, terutama untuk petani kecil yang memiliki akses terbatas terhadap tanah.
2. **Pendapatan Petani.** Pertanian yang dilakukan pada tanah yang produktif dan subur memiliki potensi untuk memberikan hasil panen yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, harga tanah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu juga dapat memberikan keuntungan *capital gain* jika petani memutuskan untuk menjual atau menyewakan tanah tersebut.
3. **Aset Investasi.** Tanah pertanian dapat dianggap sebagai aset investasi yang bernilai. Nilai tanah cenderung meningkat seiring waktu, terutama jika ada pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur di sekitarnya, atau permintaan untuk tanah pertanian yang tinggi. Petani yang memiliki tanah dapat memanfaatkan kenaikan nilai ini dengan menjual atau menyewakan tanah mereka di masa depan. Banyak investor melihat tanah sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan pengembalian yang baik.
4. **Jaminan Pinjaman.** Tanah juga dapat digunakan sebagai jaminan dalam mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk kegiatan pertanian. Lembaga keuangan seringkali bersedia memberikan pinjaman kepada petani dengan menggunakan tanah sebagai jaminan. Hal ini karena tanah memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan dapat digunakan sebagai jaminan yang dapat dipercaya. Petani yang memiliki tanah dapat menggunakannya sebagai agunan untuk mendapatkan akses ke modal tambahan yang

diperlukan untuk memperluas atau mengembangkan usaha pertanian mereka.

Namun, penting untuk diketahui bahwa nilai ekonomi tanah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, diantaranya lokasi, produktivitas tanah, kondisi pasar, dan kebijakan pertanian yang ada ((Hasibuan, 2014)).

Faktor produksi tanah merupakan salah satu faktor penting dalam ekonomi pertanian. Tanah memiliki peran yang krusial dalam kegiatan pertanian karena tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman dan juga tempat berlangsungnya sebagian besar proses produksi pertanian ((Hanafie, 2010)). Berikut ini beberapa faktor penting yang berkaitan dengan peran tanah dalam ekonomi pertanian:

1. Tanah sebagai sumber daya fisik memberikan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Tanah sebagai sumber daya fisik memberikan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sifat fisik tanah seperti kedalaman, tekstur, dan drainase mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyediakan air, oksigen, dan unsur hara bagi tanaman ((Ali, 2005); (Zuhaida & Kurniawan, 2018)).
2. Kesuburan tanah dapat diartikan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah yang subur memiliki kandungan unsur hara yang memadai dan pH yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah meliputi kandungan bahan organik, kadar nitrogen, fosfor, dan kalium, serta keseimbangan pH tanah ((Hanafie, 2010); (Zuhaida & Kurniawan, 2018)).
3. Tanah yang baik memiliki kemampuan untuk memproduksi hasil pertanian yang tinggi ((Hanafie, 2010)). Produktivitas tanah dapat diukur berdasarkan jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah tersebut, tingkat produksi tanaman per hektar, atau hasil panen yang diperoleh dari tanah tersebut ((Ali, 2005)).

4. Lokasi tanah dalam konteks geografis juga berperan dalam ekonomi pertanian. Faktor seperti iklim, curah hujan, suhu, dan topografi di sekitar tanah dapat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh, periode tanam, dan metode produksi pertanian yang dapat digunakan ((Hanafie, 2010); (Ali, 2005)).
5. Tanah memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam sektor pertanian. Harga tanah dapat mempengaruhi biaya produksi dan pendapatan petani. Tanah juga dapat menjadi aset investasi yang bernilai dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk kegiatan pertanian ((Hanafie, 2010)).

Pentingnya faktor produksi tanah dalam ekonomi pertanian menekankan perlunya pengelolaan yang baik terhadap tanah pertanian. Upaya untuk menjaga kesuburan tanah, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan melindungi tanah dari degradasi menjadi hal penting dalam memastikan kelangsungan produksi pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

### **1. Produktivitas Tanah**

Tanah yang baik memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tanah, yaitu:

- a. Tanah yang subur mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikro elemen penting lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang sehat dan dapat berproduksi tinggi ((Agromedia, 2007)). Nutrisi ini diserap oleh akar tanaman dan digunakan dalam proses metabolisme. Tanah yang subur juga memiliki kemampuan untuk menyimpan air dengan baik.
- b. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasaan tanah. Beberapa tanaman tumbuh lebih baik dalam kondisi tanah yang lebih asam, sementara yang lain membutuhkan tanah yang lebih basa. Sebagian besar tanaman membutuhkan pH

tanah yang seimbang untuk pertumbuhan yang baik. pH tanah yang tidak sesuai dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Menjaga pH tanah yang sesuai untuk tanaman yang ingin ditanam adalah penting untuk meningkatkan produktivitas.

- c. Bahan organik seperti humus meningkatkan kualitas tanah dengan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Bahan organik juga membantu meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah yang berperan penting dalam proses penguraian bahan organik dan sirkulasi nutrisi.
- d. Tanah yang baik memiliki struktur yang baik. Struktur tanah adalah partikel-partikel tanah yang saling terikat membentuk agregat-agregat kecil. Struktur tanah yang baik memungkinkan pergerakan air, udara, dan akar tanaman dengan baik, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan air dan nutrisi.
- e. Tekstur tanah adalah ukuran partikel tanah seperti pasir, debu, dan liat. Tanah yang memiliki tekstur yang baik, yaitu campuran yang seimbang antara partikel-partikel tersebut, memiliki sifat drainase yang baik dan mampu menyimpan air dan nutrisi dengan baik.
- f. Tanah yang produktif memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan air dengan baik. Kelembaban tanah yang tepat penting untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Terlalu basah atau terlalu kering dapat mempengaruhi produktivitas tanah.
- g. Tanah dengan sistem drainase yang baik memungkinkan air berlebih untuk mengalir keluar dari tanah, mencegah rongga udara dalam tanah menjadi terlalu jenuh, dan mencegah tanaman tenggelam. Drainase yang buruk dapat mengakibatkan genangan air yang dapat merusak akar tanaman dan menghambat pertumbuhannya.

- h. Topografi tanah, seperti kemiringan dan kontur, dapat mempengaruhi produktivitas tanah. Tanah yang terletak pada lereng yang terlalu curam mungkin lebih rentan terhadap erosi tanah, sementara tanah yang datar atau memiliki lereng yang landai dapat memungkinkan air dan nutrisi untuk meresap lebih baik ke dalam tanah.

Mengukur produktivitas tanah melibatkan analisis berbagai faktor ini dan dapat dilakukan dengan cara memonitor pertumbuhan tanaman, mengukur hasil panen, dan melakukan analisis kimia dan fisik tanah ((Saosang et al., 2022)). Semua faktor ini berkontribusi pada produktivitas tanah yang baik dan kemampuan tanah untuk menghasilkan hasil pertanian yang tinggi.

## **2. Peran Sifat Fisik Tanah Terhadap Ekonomi Pertanian**

Sifat fisik tanah memainkan peran penting dalam menyediakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanah memberikan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan menyerap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan.

Sifat fisik tanah seperti kedalaman, tekstur, dan drainase mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyediakan air, oksigen, dan unsur hara bagi tanaman.

Beberapa sifat fisik yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam suplai air, oksigen, dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman antara lain:

- a. Kedalaman tanah mempengaruhi kemampuan akar tanaman untuk menembus lapisan tanah yang lebih dalam. Semakin dalam tanah, semakin banyak ruang yang tersedia bagi akar tanaman untuk tumbuh dan menjangkau sumber air dan nutrisi di lapisan tanah yang lebih dalam. Tanah dengan kedalaman yang baik memungkinkan akar tanaman menyerap nutrisi dengan lebih efisien.

- b. Tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyediakan dan menyimpan air dan oksigen bagi tanaman. Tanah dengan tekstur yang kasar dan berpasir cenderung memiliki drainase yang lebih baik tetapi tidak dapat menyimpan air dengan baik, sementara tanah bertekstur halus dan berlempung dapat menyimpan air dengan baik tetapi memiliki drainase yang buruk. Komposisi tekstur tanah yang ideal adalah campuran yang seimbang antara pasir, lumpur, dan debu untuk memfasilitasi ketersediaan air yang tepat bagi tanaman.
- c. Drainase tanah adalah kemampuan tanah untuk mengalirkan kelebihan air dan memperbaiki kadar oksigen di dalam tanah. Drainase yang baik penting untuk mencegah genangan air di sekitar akar tanaman yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Tanah dengan drainase yang buruk dapat mengakibatkan kelebihan air yang berlebihan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
- d. Porositas tanah dalam hal ini adalah persentase volume ruang pori total di dalam tanah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah distribusi ukuran pori di dalam tanah. Porositas tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Pori-pori dalam tanah berperan sebagai tempat penyimpanan air yang tersedia bagi tanaman. Tanah dengan porositas yang baik dapat menampung lebih banyak air, yang kemudian tersedia untuk digunakan oleh tanaman saat dibutuhkan. Ini penting untuk menjaga kelembaban tanah yang konsisten, terutama di musim kering. Proporsi ruang pori yang baik juga berperan penting dalam mempertahankan drainase dan aerasi tanah yang baik. Porositas tanah juga mempengaruhi aktivitas organisme di dalam tanah seperti mikroba, cacing tanah, dan serangga. Organisme tanah ini berperan penting dalam dekomposisi bahan organik, memperbaiki struktur tanah,

dan menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Porositas yang baik memberikan ruang bagi organisme tanah untuk bergerak dan berkembang biak, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesuburan dan kesehatan tanah.

Dengan memahami sifat fisik tanah, diharapkan petani dan pelaku industri pertanian lainnya dapat menyesuaikan komoditas tanaman yang tepat untuk hasil tanaman yang optimal. Dampaknya adalah peningkatan ekonomi pertanian.

### **3. Peran Sifat Kimia Tanah Terhadap Ekonomi Pertanian**

Sifat kimia tanah memainkan peran penting dalam menentukan kesuburan tanah dan, sebagai hasilnya, dapat berdampak signifikan pada ekonomi pertanian. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana sifat kimia tanah mempengaruhi ekonomi pertanian:

- a. Kesuburan Tanah. Sifat kimia tanah seperti pH, kandungan unsur hara, dan kapasitas tukar kation mempengaruhi kesuburan tanah. Tanah yang subur dengan kandungan nutrisi yang cukup akan mendukung pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil panen yang tinggi. Sebaliknya, tanah yang kekurangan unsur hara atau memiliki pH yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menghasilkan hasil yang rendah. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi produktivitas pertanian dan berdampak negatif pada ekonomi petani.
- b. Pemupukan. Sifat kimia tanah mempengaruhi kebutuhan pemupukan. Tanah dengan kandungan hara yang rendah memerlukan pemupukan yang lebih intensif untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Namun, pupuk juga merupakan biaya tambahan bagi petani. Oleh karena itu, pemilihan jenis dan dosis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman

berdasarkan sifat kimia tanah menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi pertanian.

- c. Toksisitas dan Pencemaran Tanah. Beberapa sifat kimia tanah, seperti kandungan logam berat atau keasaman yang tinggi, dapat menyebabkan toksisitas tanah atau pencemaran. Tanah yang terkontaminasi dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menghasilkan hasil yang rendah atau bahkan tidak layak konsumsi. Untuk mengatasi masalah ini, petani harus mengambil tindakan remediasi yang mahal, seperti menghilangkan tanah terkontaminasi atau melakukan tindakan mitigasi yang sesuai. Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi pertanian.

Dengan mempertimbangkan sifat kimia tanah dan mengelola tanah secara efektif, petani dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi biaya pemupukan, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mengurangi kerugian akibat kondisi tanah yang tidak menguntungkan. Semua ini dapat berkontribusi pada produktivitas pertanian yang lebih tinggi dan keberlanjutan ekonomi pertanian.

#### **4. Peran Sifat Biologi Tanah Terhadap Ekonomi Pertanian**

Sifat biologi tanah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi pertanian. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana sifat biologi tanah mempengaruhi ekonomi pertanian:

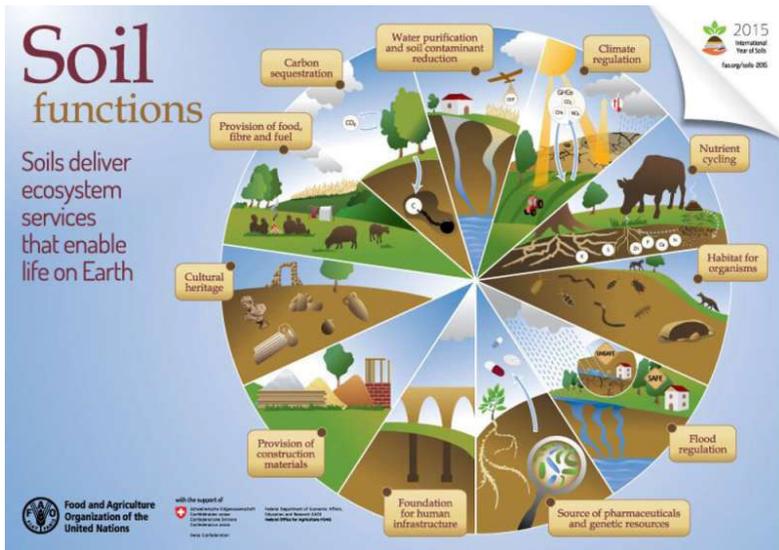
- a. Aktivitas Mikroba. Tanah yang kaya akan kehidupan mikroba memiliki potensi yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah berperan dalam menguraikan bahan organik, mengubah nutrisi dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, dan meningkatkan struktur tanah ((Parnata, 2010)). Kehadiran mikroba yang sehat dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi kebutuhan pupuk tambahan, dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Hal ini dapat berdampak positif pada ekonomi pertanian dengan mengurangi biaya pupuk dan meningkatkan hasil panen.

- b. Dekomposisi Bahan Organik. Sifat biologi tanah juga mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik. Tanah yang memiliki aktivitas dekomposer yang tinggi dapat membusukkan bahan organik dengan cepat dan menghasilkan humus yang kaya akan nutrisi. Humus yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air dan nutrisi, serta meningkatkan struktur tanah. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan irigasi tambahan dan pemupukan, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan.
- c. Sistem Perakaran Tanaman. Kesehatan sistem perakaran tanaman sangat dipengaruhi oleh sifat biologi tanah. Tanah yang mengandung banyak bahan organik, mikroorganisme yang bermanfaat, dan struktur tanah yang baik akan mendukung pertumbuhan akar yang baik dan penyerapan nutrisi yang efisien. Akar yang kuat dan sehat dapat meningkatkan kapasitas tanaman untuk menyerap air dan nutrisi, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Kualitas hasil yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi bagi petani,
- d. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman. Sifat biologi tanah juga mempengaruhi kemampuan tanah untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Beberapa mikroorganisme dalam tanah memiliki kemampuan antagonis terhadap patogen tanaman dan hama. Tanah yang mengandung populasi mikroba yang sehat dapat memberikan perlindungan alami terhadap serangan hama dan penyakit, mengurangi ketergantungan petani pada penggunaan pestisida. Mengurangi penggunaan pestisida

dapat mengurangi biaya produksi dan berdampak positif pada ekonomi pertanian.

Dengan memperhatikan sifat biologi tanah dan mengelola tanah secara berkelanjutan, petani dapat meningkatkan kesehatan tanah, mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi pertanian.



**Gambar 7.1** Fungsi tanah yang tidak hanya sebagai media tumbuh untuk tanaman, namun juga sebagai fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang penting untuk kehidupan.

(Sumber : FAO, 2019)

## Daftar Pustaka

- Agromedia, Redaksi. 2007. Petunjuk Pemupukan. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Ahyari, Agus. 2002. Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi Buku 1. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ali, Hanafiah Kemas. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Arifin. 2015. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: CV. Mujahid Press.
- Arwati, Sitti. 2018. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar: CV Inti Mediatama.
- Assauri, Sofjan. 2008. *Manajemen Pemasaran*, edisi pertama, cetakan kedelapan. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan)*. Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daniel, Moehar. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hasibuan, Bernard. 2014. Valuasi Ekonomi Lingkungan Nilai Gunaan Langsung dan Tidak Langsung Komoditas Ekonomi. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3(2), 113–126.
- Ihsannudin, Pinujib, S., Subejo, & Bangko, B.S. 2016. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 395–409. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Maulidah, Silvana. 2012. *Faktor-Faktor Produksi Usahatani*. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mosher, Arthur Theodore. 1966. *Getting Agriculture Moving, Essentials for Development and Modernization*. The Agricultural Development Council by Praeger.
- Parnata, Ayub S. 2010. *Meningkatkan Hasil Panen Dengan Pupuk Organik*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Putra, S., Purwanto, & Kismartini. 2013. Perencanaan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Selo. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan “Optimasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Semarang, 10*

September 2013. *Program Studi Ilmu Lingkungan dan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.*

- Saosang, Safira Juniarti, Mambuhu, Nurmasiyita, & Katili, Hidayat A. 2022. Analisis Tingkat Kesuburan Tanah pada Tanaman Nilam (*Pogostemon cablin*) di Desa Balingara dan Desa Bella Kecamatan Nuhon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Pertanian*, 2(1), 155–161. <https://10.52045/jimfp.v2i1.255>.
- Sumarni, Murti & Soeprihanto, John. 1995. *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Edisi IV. Yogyakarta: Liberty.
- Suratiyah, K. 2008. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Zuhaida, Anggun & Kurniawan, Wawan. 2018. Deskripsi Saintifik Pengaruh Tanah pada Pertumbuhan Tanaman: Studi Terhadap QS. Al a'raf Ayat 58. *Jurnal Thabiea* 1(2), 61–69. <http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Thabiea>.





## **BAB 5.**

# **PRODUKSI MODAL DALAM EKONOMI PERTANIAN**

*Oleh : Dina Omayani Dewi, SP, MSc.*

### **Pengertian Modal**

---

Modal merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pertanian. Terbatasnya ketersediaan modal akan menjadi masalah umum bagi petani. Kebutuhan untuk modal meningkat saat harga input pertanian meningkat, seperti Benih, pupuk, obat-obatan dan upah. Pengertian modal adalah sesuatu yang dijadikan landasan untuk bekerja atau usaha, baik berupa uang, keterampilan atau hal lainnya. Modal merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah usaha. Dengan ketersediaan dan kecukupan modal, sistem pertanian dapat melakukan kegiatan produksinya. Definisi modal adalah modal yang diciptakan oleh produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian modal nampaknya menekankan pada nilai, daya beli, daya dalam kaitannya dengan barang modal atau barang konsumsi (Bambang Riyanto, 2014). Modal merupakan faktor penting dalam operasi, pengembangan usaha dan investasi perusahaan. Dalam bidang pertanian, modal merupakan

salah satu faktor terpenting kedua dalam produksi pertanian setelah tanah. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang /uang yang bersama dengan tanah serta tenaga kerja yang menghasilkan barang baru, dalam hal ini produk pertanian.. Menurut (Mubyarto, 1989), Modal merupakan salah satu faktor produksi pertanian bersama dengan tanah, tenaga kerja dan pengusaha, sedangkan kredit hanya merupakan instrumen pembentukan modal itu sendiri. Modal pertanian dapat berupa uang tunai, uang giral, atau barang yang digunakan dalam produksi pertanian.

Modal pertanian terdiri dari berbagai jenis seperti:

1. **Modal fisik;** Modal fisik dalam pertanian meliputi peralatan dan mesin pertanian seperti traktor, alat tanam, alat panen dan gudang penyimpanan. Infrastruktur yang relevan melibatkan pengembangan lingkungan fisik yang membantu masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi lebih produktif. Scoone's dalam (Sri Endang and Saleh, 2014). Modal fisik berupa peralatan juga dapat menghemat penggunaan tanah dan tenaga kerja. Oleh karena itu, modal dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu modal simpanan tanah dan modal simpanan tenaga kerja (Suratiyah, 2008).
2. **Modal Manusia;** Modal manusia di bidang pertanian mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petani. Modal manusia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi pertanian serta meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola risiko, berinovasi secara teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Secara konseptual, menurut beberapa ahli ekonomi seperti (Becker, 2002), human capital didefinisikan sebagai pengetahuan, informasi, ide, keterampilan dan kesehatan seseorang. Faktor human capital merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja (Palmade dalam (Usaid, 2005). (Suratiyah, 2008) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu terutama pada pertanian yang sangat tergantung pada

- musim.). Besar kecilnya usaha tani mempengaruhi besarnya dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan (Soekartawi, 1993).
3. Modal alam; Modal alam mengacu pada sumber daya alam yang digunakan dalam produksi pertanian, seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Modal alam dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produksi pertanian. Upaya yang dapat dilakukan dalam penggunaan modal alam yang berkelanjutan adalah dengan konservasi tanah dan air, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. (Costanza *et al.*, 1997) mendefinisikan modal alam sebagai ekosistem alami yang menciptakan aliran «nilai» barang dan jasa. (Alexander & Pratto, 2014) mendefinisikan modal alam sebagai “stok sumber daya alam, baik terbatas maupun terbarukan, dan ekosistem yang membawa manfaat langsung dan tidak langsung bagi ekonomi, masyarakat, dan dunia di sekitar kita”. Definisi ini menekankan pentingnya manfaat atau nilai modal alam dalam kehidupan manusia khususnya di bidang pertanian.
  4. Modal Tunai atau Finansial; Modal tunai dalam bidang pertanian mencakup pinjaman, investasi, dan bantuan keuangan lainnya yang diberikan oleh Bank, lembaga keuangan, atau pemerintah. Uang atau modal keuangan diperlukan untuk membeli input pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian dan untuk membayar upah atau biaya transportasi pekerja. Berbagai jenis modal tunai, atau modal finansial, dalam pertanian meliputi: tabungan atau simpanan, pinjaman, investasi, subsidi pemerintah, dan penjualan hasil panen.
  5. Modal sosial; meliputi jaringan sosial, hubungan petani dengan pembeli dan konsumen, serta organisasi petani untuk produksi, pemasaran dan penjualan hasil pertanian. Modal sosial dapat membantu petani mengakses pengetahuan, teknologi dan pasar yang lebih baik, serta meningkatkan daya tawar petani dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

(Greve, 2010) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah orang lain. dan di luar organisasi. Dimana modal sosial terkait dengan produktivitas dengan membantu tenaga kerja untuk mentransfer pengetahuan dan menumbuhkan ide-ide inovatif yang meningkatkan produktivitas (Delmas dan Pekovic, 2013). Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu akan banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian. Selain itu, (Putnam, 1993) dalam (Field, 2011) menyatakan bahwa modal sosial merupakan manifestasi dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma (atau timbal balik) dan jaringan (ikatan komunitas). Munculnya organisasi sosial ini dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, jika seorang petani bergabung dengan kelompok tani, dan kelompok tani memiliki bajak untuk kepentingan kelompok, petani . dapat melakukannya dengan mudah menggunakan bajak sewaan untuk keperluan lain, yang memungkinkan modal sosial untuk mengurangi biaya tetap (fixed cost) (Sawitri, 2010).

6. Modal intelektual; Modal intelektual dapat berupa teknologi dan pengetahuan tentang pertanian, misalnya dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru atau penggunaan teknologi maju di bidang pertanian. Menurut (Xin Long Xu, 2020)), modal intelektual adalah kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan profesional, hubungan interpersonal yang baik, dan keterampilan teknologi yang bila diterapkan akan memberikan keunggulan kompetitif bagi masyarakat atau organisasi. Selain itu, (Williams, 2001) mendefinisikan modal intelektual sebagai informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan nilai di tempat kerja. (Bontis & Richradson, 2000) mencatat bahwa para peneliti secara umum telah mengidentifikasi tiga konstruksi utama

modal intelektual, yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan. Modal manusia adalah kombinasi dari warisan genetik, pendidikan, pengalaman dan sikap hidup.

## Sumber Daya Modal

---

Sumber daya modal adalah barang (peralatan) yang dapat digunakan untuk memproduksi barang lain, misalnya: Uang, bahan baku, mesin, peralatan, dan sebagainya. (Soekartawi, 1993). Sumber daya modal diklasifikasikan sebagai berikut;

### 1. Berdasarkan sifatnya, modal terbagi menjadi:

- a. *Modal tetap (fixed capital)* adalah modal yang tidak habis dalam suatu proses produksi atau dapat digunakan berulang kali dalam suatu proses produksi yang melibatkan tanah, mesin, pabrik, gudang, dan lain-lain. Jenis modal ini harus dipertahankan agar dapat digunakan dalam waktu yang lama, karena modal ini lama kelamaan akan menurun kualitasnya. Secara umum terdapat 5 (lima) implikasi biaya yang terkait dengan penggunaan modal tetap, yaitu bunga atas modal, penyusutan, asuransi, pemeliharaan, dan biaya tambahan. Pada umumnya diperhitungkan biaya penyusutan, asuransi, bunga dan pemeliharaan bangunan, karena bangunan pada umumnya bermanfaat pada jangka waktu tertentu (Suratijah, 2008).
- b. *Modal Tidak Tetap (modal lancar)*; adalah modal yang dikonsumsi dalam suatu proses produksi (Tiku, 2008). Modal tidak tetap biasanya habis atau berkurang setelah digunakan, misalnya: bibit, pupuk, pestisida, upah dan bahan bakar untuk mesin pertanian. Modal ini ini tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan dalam siklus produksi atau musim tanam. Di bidang pertanian, penggunaan modal tetap dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman dalam

jangka pendek, namun harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan penggunaan modal tetap atau jangka panjang.

## 2. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi :

- a. *Modal Abstrak*; merupakan modal yang tidak berwujud fisik (intangible), tetapi sesungguhnya menentukan hasil produksi, seperti pengetahuan, keterampilan, kebijakan, pengalaman, dan hubungan social. Modal Abstrak sangat penting dalam usahatani karena dapat membantu petani atau kelompok tani untuk mengelola sumber daya dengan baik, meningkatkan kualitas tanaman, meningkatkan produktivitas dan memperkuat posisinya di pasar.
- b. *Modal Konkrit*, yaitu modal yang wujud fisiknya tampak (tangible). Modal fisik dalam pertanian mengacu pada sumber daya fisik atau material yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Modal material/fisik ini meliputi tanah, bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, mesin dan infrastruktur seperti irigasi, jalan dan gudang. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan modal konkrit agar berguna secara optimal adalah dengan memilih sumber daya yang tepat, memperbaiki dan memelihara peralatan, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak.

## 3. Menurut sumbernya, modal terdiri dari:

- a. Modal sendiri; yaitu modal yang dikeluarkan oleh petani sendiri, yang berasal dari simpanan, pemberian, subsidi, kerabat dan hasil pertanian tahun sebelumnya (Mardiyatmo, 2008). Manfaat modal sendiri adalah: (i). Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya manajemen, (ii). tidak bergantung pada pihak lain, (iii). Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, (iv). Tidak ada kewajiban mengembalikan modal. Namun, ada kerugian menggunakan ekuitas, yaitu: a) jumlahnya terbatas, b) sulit memperoleh modal tertentu dari calon

pemilik baru (calon pemegang saham baru) karena harus mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha pertaniannya ke depan; (c) Kurangnya motivasi pemilik, artinya petani yang menggunakan modal memiliki insentif usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan modal asing. b. Modal asing (pinjaman) adalah modal yang diperoleh petani di luar pendapatannya. Dapat berupa kredit pertanian yang terdiri dari kredit formal dan kredit informal serta kemitraan (Manurung, 1998). Modal asing (pinjaman) adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak non pertanian dan biasanya berasal dari pinjaman. Modal hutang memiliki keuntungan yang tidak terbatas, misalnya tersedia dalam jumlah besar. Selain itu, ini mendorong petani untuk mengambil bisnis leverage dengan serius. Keuntungan dari modal hutang adalah: (a) Jumlahnya tidak terbatas, (b) Insentif usaha yang tinggi. Modal hutang memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (a) Berbagai biaya seperti bunga dan biaya pengelolaan berlaku. b) harus pulih (c) beban moral; Usaha pertanian yang mengalami kegagalan/kerugian atau masalah yang mengakibatkan kerugian menimbulkan beban moral berupa hutang yang tidak terbayar (Kasmir, 2007).

- b. *Modal Patungan*; Selain modal sendiri atau pinjaman, modal lain yang juga bisa dijadikan modal usaha tani yaitu berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain dengan cara menggabungkan modal sendiri dengan modal teman atau beberapa orang (berperan sebagai mitra usaha) (Ambadar, 2010). Dari perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan aset yang digunakan untuk menjalankan usaha untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pengusaha.

#### 4. Berdasarkan Kepemilikan, modal dibagi:

- a. *Modal perseorangan*; yaitu modal tersebut dimiliki oleh perseorangan. Seperti pada usaha lainnya, pertanian juga memiliki modal atau modal perseorangan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok tani yang menjalankan usaha pertanian. Modal ini terdiri dari investasi modal awal dan akumulasi laba dari laba operasi sebelumnya, contohnya: lahan pertanian milik pengusaha atau kelompok tani, bangunan seperti rumah, gudang, kendaraan (tractor), alat pemanen dan alat angkut pertanian, peralatan seperti alat budidaya, alat penyemprot dan alat panen tani.
- b. *Modal Masyarakat*; yaitu modal dimiliki oleh banyak orang dan menguntungkan banyak orang. Modal masyarakat dalam pertanian adalah modal yang dimiliki atau disediakan oleh masyarakat atau kelompok tani untuk membiayai usaha pertanian. Modal ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau sumbangan dari pihak swasta atau masyarakat. Modal masyarakat dapat berupa: tanah, bangunan atau prasarana milik masyarakat atau kelompok tani yang digunakan untuk keperluan pertanian, seperti saluran irigasi atau jalan menuju lahan pertanian.

#### 5. Berdasarkan Bentuknya, modal dibagi menjadi:

- a. *Modal Tunai/Uang*, artinya modal berupa dana. Berdasarkan bentuknya, modal pertanian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah modal uang atau modal tunai. Modal tunai pertanian meliputi uang atau barang cair yang dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan pertanian, Modal tunai yang diperoleh dari penjualan hasil pertanian dapat digunakan untuk membiayai kelanjutan kegiatan pertanian atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi petani.

- b. *Modal Barang*; adalah modal yang berupa alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Aset produksi pertanian atau aset tetap adalah semua alat atau barang yang digunakan dalam proses produksi pertanian dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Modal dalam pertanian dapat berupa mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, prasarana dan sarana serta tanah dan bangunan. Beberapa contoh barang modal pertanian adalah: alat mesin pertanian, peralatan dan perlengkapan, infrastruktur dan fasilitas; bangunan, tanah dan bangunan; tanah/lahan pertanian, lahan penggembalaan ternak, dan bangunan pertanian seperti kandang, gudang, dan Gudang.

## **Kendala dalam Ketersediaan Modal**

---

Kendala dalam permodalan bagi pembiayaan usaha tani kecil disebabkan karena sulitnya petani mengakses lembaga keuangan formal. Pengelolaan usaha tani menjadi sulit dan dianggap tidak dapat dibiayai. Secara umum, usaha pertanian tidak memenuhi persyaratan dan 5 (lima) kriteria yaitu karakter, status keuangan, kemampuan membayar, modal dan agunan), yang merupakan aturan/mekanisme perbankan standar untuk menyalurkan modal ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, usaha tani membutuhkan suatu lembaga keuangan atau pembiayaan yang dapat menghilangkan yang dihadapi petani.

## **Solusi dalam Masalah Permodalan Petani**

---

Dalam memecahkan masalah permodalan petani dari sudut pandang pengusaha, melalui kemitraan melalui konsep koperasi. Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini adalah kemitraan antara usaha besar atau menengah dengan petani kecil atas dasar status atau derajat yang sama bagi kedua belah pihak. Kredit sebagai modal kerja mencerminkan fakta bahwa kredit secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan produktif, dimana kredit berperan

dalam perolehan faktor produksi (Asih, 2008). Selain penggunaan modal, ada beberapa sumber pembiayaan di bidang pertanian yang dapat digunakan sebagai modal, misalnya (a). Bank dan Lembaga Keuangan; Bank dan lembaga keuangan dapat meminjamkan kepada petani dengan tingkat bunga yang berbeda. Ada beberapa lembaga keuangan yang fokus pada kredit pertanian, seperti BRI Unit Desa dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). (b). Pemerintah; Pemerintah dapat memberikan subsidi dan program dukungan keuangan kepada petani dan pertanian seperti bantuan pupuk, bibit dan modal usaha. Pemerintah juga bisa memberikan pinjaman berbunga rendah melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). (c). Investor; Investor dapat memberikan modal untuk pertanian dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk saham atau investasi langsung. Investor juga dapat memberikan kredit atau pokok dengan bunga atau bagian keuntungan yang disepakati. (d). Crowdfunding atau Penggalangan dana; Crowdfunding merupakan cara menghimpun dana dari banyak orang secara online melalui platform crowdfunding seperti kitabisa.com atau Jadikan.com. Crowdfunding bisa menjadi alternatif sumber permodalan bagi petani dan peternakan yang membutuhkan modal kecil. (e). Keuangan Syariah; Keuangan syariah merupakan alternatif sumber permodalan yang semakin populer di Indonesia. Keuangan Islam dapat ditawarkan oleh bank Islam dan lembaga keuangan lain dengan system bagi hasil.

## Daftar Pustaka

---

- Acemoglu, D. and Autor, D. (2005) *Lectures in Labor Economics, chapter 1.*
- Alexander, C. and Pratto (2014) *Valuing the World Pround US: Introduction to Natural Capital Special Report.* To Economics.
- Ambadar, J. et Al (2010) *Membentuk Karakter Pengusaha.* Jakarta Selatan: Kaifa.

- Asih Purwanto (2016) 'Pengaruh Kualitas Produk, Promosi dan Desain Terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio', *Jurnal Universitas Muhammadiyah. Surakarta* [Preprint]. Available at: <http://eprints.ums.ac.id/1901/1/B100030179.pdf>.
- Bambang Riyanto (2014) 'Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi'. Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta.
- Becker, G.S. (2002) *The Age of Human Capital*. Edited by E. P. Palo Alto: Hoover Institution Press.
- Bontis, N. and Richradson, S. (2000) 'Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industry', *Journal of Intellectual Capital* [Preprint].
- Cohen, D. and Soto, M. (2007) 'Growth and Human Capital: Good Data, Good Results', *Journal of Economic Growth*, 12, pp. 51–76.
- Coleman, J.S. (2009) 'Social Capital in the Creatian of Human Capital in P', *J. Perencanaan dan Kota*. Edited by Dasgupta and I. Serageldin. Translated by B.K.S. Kabupaten Karawang, 25(1), pp. 17–36.
- Costanza, R. *et al.* (1997) 'The value of the world ecosystem services and natural capital', *Nature*, 387(15), pp. 253–260.
- Delmas, M. and Pekovic, S. (2013) 'engaged organization: Human Capital, Social Capital, Green Capital and Labor Productivity'. Business: Economics.
- Field, J. (2011) *Modal Sosial. Cetakan Ke2.PT*. Kreasi Wacana.
- Greve, A. (2010) 'Absorptive Capacity and Social Capital: Innovation and Environmental Regulation', in E. Bjørndal *et al.* (eds) *Energy, Natural Resources and Environmental Economics. Energy Systems*. Berlin, Heidelberg: Springer. Available at: [https://doi.org/10.1007/978-3-642-12067-1\\_21](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12067-1_21).
- Krishnamurti, B. (2003) 'Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel – Th, II, (2), p.

- Lucas, R.E. (1988) 'On the Mechanics of Economic Development', *Journal of Monetary Economics*, 22, pp. 3–42.
- Makeham, J.P. dan R.L.M. (1991) *Usahatani Daerah Tropis .Diterjemahkan oleh Basilius B. Teku*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto (1977) 'Pengantar Ekonomi Pertanian', in *Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Sosial Ekonomi (LP3ES*. Jakarta.
- Mubyarto (1989) *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Mudlak, Y. (1988) 'Capital Accumulation: The Choice of Techniques and Agriculture Output', in Mellor and Achmad (eds) *Agriculture Price Policies for Development Countries*. John Hopkins, London.
- Putnam, R.D. (1993) 'The Prosperous Community', *The American Prospect*, 4(13), pp. 35–42.
- Romer, P.M. (1990) 'Human Capital And Growth: Theory and Evidence', *CarnegieRochester Conference Series on Public Policy*, 32, pp. 251–286.
- Sawitri, D. dan I.F.S. (2010) 'Modal sosial petani dan perkembangan industri di desa sentra pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang', *J. Perencanaan dan Kota*, 25(1), pp. 17–36.
- Soekartawi (1993) *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pres: Jakarta.
- Sri Endang and Saleh (2014) *Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Suratiyah, K. (2008) 'Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya'. Jakarta.
- Tiku (2008) 'Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah Menurut Sistem Mina Padi dan Non Mina Padi [Skripsi]', in *Program Studi Manajemen Bisnis. Fakultas Pertanian, IPB*.

- Usaid (2005) *Measuring Competitiveness and Labor Productivity in Cambodias Garment Industry*. Usaid's Bureau of Economic Growth.
- Williams, M. (2001) 'Is intellectual capital performance and disclosure practices related?'; *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), pp. 192–203.
- Xin Long Xu, H.H.C. dan R.R.Z. (2020) 'The Impact of Intellectual Capital Efficiency on Corporate Sustainable Growth-Evidence from Smart Agriculture in China', *Agriculture Journal*. [Preprint].





## **BAB 6.**

# **PASAR DAN KEBIJAKSANAAN TATA NIAGA**

*Oleh : Surya Abadi Sembiring*

### **Pendahuluan**

---

Petani transmigrasi mengusahakan usahatani ubikayu di Unit Pemukiman Transmigrasi Natal tahun 1986. Petani melakukan pemanenan, produksi melimpah, tetapi kesulitan memasarkan hasil panen. Kendala yang dihadapi kondisi jalan yang rusak sehingga kegiatan pengangkutan hasil untuk memasarkan produk tidak dapat dilakukan. Produksi tanpa pemasaran merugikan petani sebagai produsen dan merugikan konsumen konsumen.

Petani menanam tomat atau kol, di Kabupaten Karo tetapi tidak melakukan pemanenan karena harga tomat atau kol yang anjlok. Petani memutuskan tidak panen karena harga tidak menguntungkan baginya. Produksi usahatani dengan harga jual rendah tentu kerugian bagi petani sebaliknya produksi usahatani dengan harga jual yang tinggi menguntungkan petani.

Kendala yang dihadapi petani ubi kayu, petani tomat atau kol, yaitu pengangkutan dan harga. Pengangkutan terkait dengan

kegiatan tataniaga, sedangkan harga ditentukan permintaan dan penawaran. Petani tidak memiliki kemampuan mengatasi jalan rusak dan mempengaruhi harga usahataniannya.

Oleh karena itu, pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Pada umumnya setiap pemerintahan melakukan intervensi dalam kegiatan pembangunan pertanian. Campur tangan tersebut ditentukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah menetapkan tujuan, instrumen kebijakan dan pelaku kebijakan.

## **Pengertian Pasar**

---

Petani sayuran di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara pada umumnya memiliki ketrampilan mengusahakan usahataniannya khususnya sayur mayur. Yang terpenting bagi mereka yaitu membutuhkan harga hasil usahataniannya tinggi. Bagi petani, hal yang menggembirakan jika harga tinggi pada waktu menjual hasil usahataniannya. Petani coklat di Kecamatan Deli Serdang, kecewa mengetahui harga coklat tidak seperti yang diharapkan.

Petani kopi di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun memilih tidak menjual kopi ke agen karena mengetahui harga kopi dari agen tidak menguntungkan baginya. Petani tersebut memilih menunda dan menunggu harga kopi yang menguntungkan baginya kemudian menjualnya. Petani padi sawah di Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai memberi pernyataan “ pupuk bersubsidi silahkan dicabut asalkan harga gabah yang menguntungkan kepada petani!”

Dari contoh-contoh tersebut jelaslah bahwa harga hasil usahataniannya merupakan faktor terpenting bagi petani. Bagi petani harga merupakan faktor insentif utama melakukan usahataniannya (Mosher, 1987). Mengingat karakteristik pertanian bersifat musiman (Norton, et al, 2006), tentu harga produk pertanian diperhadapkan

terhadap goncangan harga khususnya pada musim panen raya dan musim panceklik.

Salah satu kendala utama pertanian adalah kelebihan produksi (*over production*) yang mempengaruhi harga produk dan pendapatan, sedangkan elastisitas harga agregat permintaan produk total pertanian untuk penggunaan domestik adalah -0,20 dalam jangka pendek dan -0,40 dalam jangka panjang. Artinya, setiap kenaikan harga produk pertanian sebesar 1 persen menyebabkan penurunan terhadap jumlah yang diminta sebesar 0,20 persen dalam jangka pendek dan 0,40 persen dalam jangka panjang. (Tweeten, 1991

Harga produk pertanian ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan kurva permintaan. Perpotongan kurva penawaran dan kurva permintaan menentukan harga keseimbangan. Perilaku dari sisi produsen yaitu menjual lebih banyak barang pada harga yang lebih tinggi, sedangkan dari sisi konsumen yaitu membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah. Bagaimana mempertemukan kepentingan produsen dan kepentingan konsumen yang berbeda ?

Master (2011) membuat sub bab tulisannya dengan penawaran, permintaan dan kebijakan pemerintah. Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara jumlah produksi pada tiap tingkat harga, sedangkan kurva permintaan menunjukkan hubungan terbalik jumlah konsumsi pada tiap tingkat harga. Kenaikan harga meningkatkan produksi, disisi lain menurunkan konsumsi. Kenaikan harga menyebabkan surplus produsen naik sedangkan surplus konsumen berkurang, tetapi kerugian surplus konsumen lebih besar dari keuntungan surplus produsen karena kenaikan produksi, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun. Dalam kondisi seperti ini pemerintah memiliki peranan melalui kebijakan untuk menjawab kegagalan pasar.

Apakah pasar komoditi pertanian pro ke pasar persaingan sempurna atau pasar bersifat monopoli ? Pada umumnya penulis cenderung menyatakan bahwa pasar produk pertanian adalah pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, baik pembeli

dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga tetapi sebagai penerima harga (*price taker*), sifat barang yang diperdagangkan harus homogen, ada kebebasan penjual dan pembeli untuk keluar masuk pasar dan pengetahuan yang sempurna dari pembeli dan penjual. (Mubyarto, 1989; Castle, 1991; Dahl, Dale C and Hammond, Jerome W, 1977)

Faktanya, asumsi pasar persaingan sempurna sukar untuk dipenuhi khususnya pada komoditi pertanian. Sebagai contoh, pasar komoditi padi di desa, penjual (petani) jauh lebih banyak daripada pembeli (pengepul/pedagang pengumpul). Kasus tersebut, juga ditemukan pada komoditi pertanian lainnya. Apakah itu membuktikan bahwa tidak ada sifat pasar monopoli pada pasar produk pertanian ?

Disisi lain, petani yang memiliki modal terbatas memiliki kendala memperoleh sarana produksi untuk kegiatan usahataniya. Petani padi sawah di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara memperoleh kredit dari “toke” dengan perjanjian dibayarkan setelah panen dan hasil usahataniya dijual kepada “toke” (Sembiring et al, 2022) Keterikatan tersebut adalah petani sering meminjam uang ke “toke” sebelum petani menjual hasil produksinya, sehingga setelah petani memanen hasil produksinya mereka harus menjual ke “toke” tersebut.

Dengan kata lain tataniaga hasil pertanian dilakukan kepada pedagang perantara merangkap sebagai pemberi kredit. Keterikatan petani dengan pedagang perantara sekaligus sebagai pemberi kredit, menyebabkan pedagang dari luar daerah kesulitan masuk pasar di wilayah tersebut. Dalam salah satu faktor asumsi pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi.

Struktur pasar beberapa komoditi seperti padi, bawang merah, cabai, dan daging sapi dari petani ke pedagang adalah oligopsoni. (InterCafe dan LPPM, 2018)

## Pengertian Kebijakan Tataniaga

---

Dari kacamata analisis kebijakan, pembuat kebijakan diperhadapkan dengan adanya gap antara teori dengan dunia riil (Sadoulet dan Janvry, 1995). Gap antara teori dengan fakta empiris menyebabkan hadirnya pemerintah. Misalkan, menurut teori permintaan dan penawaran, petani padi sawah yang memasarkan gabah pada musim panen raya maka harga gabahnya rendah dan petani akan rugi karena pada musim panen raya terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*) sehingga harga didorong turun.

Disisi lain, pada musim paceklik, harga gabah naik karena kekurangan permintaan sehingga konsumen dirugikan sedangkan produsen diuntungkan. Dengan kata lain, menurut teori pasar, pada musim panen raya petani dirugikan sedangkan konsumen diuntungkan, sebaliknya pada musim panceklik, petani diuntungkan sedangkan konsumen dirugikan. Mengingat peranan beras yang strategis bagi Indonesia, pemerintah hadir membantu petani, melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lewat peraturan- peraturan.

Ghatak dan Ingersent (1984) menyebutkan alasan kehadiran pemerintah dalam tataniaga: (1) alasan ekonomi seperti mengendalikan harga, nilai tukar dan pengaturan pajak untuk mengendalikan sumberdaya dan perekonomian nasional, meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) produsen domestik untuk pasar ekspor, membantu sektor swasta mengembangkan pasar dan produk baru, dan (2) alasan non-ekonomi seperti alasan ideologi.

Pengertian tentang kebijakan diantara penulis berbeda. *Policy is defined as the course of action chosen by government towards an aspect of the economy, including the goals the government seeks to achieve, and the choice of methods to pursue those goals* (Ellis, 1992). Berdasarkan definisi tentang kebijakan tersebut, ada tiga kata penting terkait kebijakan: (1) tindakan pemerintah terhadap aspek ekonomi, (2) tujuan yang ingin dicapai pemerintah, dan (3) metode yang dipilih untuk mencapai tujuan.

Kebijakan tataniaga berdasarkan definisi diatas yaitu tindakan pemerintah di bidang tataniaga untuk mencapai tujuan melalui instrumen kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Mubyarto (1989) mendefinisikan kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendekatan studi tataniaga : (1) pendekatan fungsi, (2) pendekatan kelembagaan, dan (3) pendekatan struktur pasar.(Hill, Lowell D, 1991) yang manakah diantara dari ke tiga pendekatan studi tersebut yang membutuhkan adanya campur tangan pemerintah ? Mengapa pemerintah intervensi terhadap kegiatan tataniaga ? Apa saja kegiatan tataniaga yang dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dan dampak intervensi pemerintah terhadap kegiatan tataniaga ?

Timmer (1987) menjelaskan keterkaitan kebijakan harga pangan dengan tataniaga pangan. Kegiatan tataniaga pangan yang dikaitkan dengan kebijakan harga (*price policy*) antara lain: penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pertukaran kepemilikan. Untuk komoditi pangan, Timmer mengaitkan kebijakan harga pangan dengan pendekatan fungsi. Instrumen kebijakan harga untuk fungsi penyimpanan adalah harga minimum (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*). Sedangkan instrumen kebijakan harga untuk fungsi pengangkutan adalah harga minimum atau harga maksimum yang berlaku seragam (*uniform*) di wilayah yang luas. Pada harga minimum yang seragam maka sektor swasta lebih menyukai daerah yang lebih dekat untuk memenuhi permintaan akhir sedangkan instansi pemerintah akan menangani daerah yang jauh dengan biaya tinggi.

## **Tujuan dan Instrumen Kebijakan Tataniaga**

---

Tujuan kebijakan diantara penulis bisa berbeda. Ada penulis menyebutkan tujuan kebijakan pertanian (Mubyarto, 1989, Tomeck dan Robinson, 1990 dan Norton (2004) dan ada yang menyebutkan

secara eskplisit tujuan kebijakan tataniaga. Sembiring (2021) menguraikan berdasarkan tujuan kebijakan Norton, Tomeck dan Robinson dan Ellis diperoleh kesimpulan bahwa tujuan kebijakan bervariasi, skopanya dari pedesaan ke nasional, dari aspek mikro ke makro, kebutuhan konsumsi dan asupan gizi, dari pendapatan ke pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Tujuan kebijakan tataniaga: (1) menjaga petani dan konsumen dari pedagang parasit (*parasitic traders*), (2) stabilisasi harga atau meningkatkan harga di tingkat usahatani, (3) menurunkan margin tataniaga, (4) meningkatkan kualitas output petani dan standard minimum output usahatani, (5) meningkatkan ketahanan pangan. (Ellis, 1992)

Instrumen kebijakan tataniaga: (1) monopoly parastatals yaitu badan usaha monopoli milik pemerintah, untuk mengendalikan sistem tataniaga khususnya komoditi ekspor. Badan usaha ini menangani semua kegiatan tataniaga: pengolahan, berperan sebagai penjual akhir dari produsen ke konsumen atau ekspor. (2) non-monopoly parastatals di Indonesia dilalukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dipercayakan sebagai badang penyangga nasional khususnya makanan pokok (beras). Tugas yang dipercayakan kepada Bulog untuk mengimplementasikan harga minimum dan maksimum khususnya untuk komoditi beras. (3) koperasi petani, (4) memberikan perijinan perdagangan (5) instrumen untuk meningkatkan perilaku dan kinerja pasar: meningkatkan sistem informasi tataniaga, fungsi regulasi, dan menyediakan fasilitas tataniaga seperti investasi infrastuktur. dan (6) instrumen untuk memperbaiki struktur pasar.

Sembiring, SA (2021) menjelaskan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan tataniaga berdasarkan 10 Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan dari tahun 2001-2015. Salah satu instrumen kebijakan yang tetap dipertahankan untuk mencapai ketahanan pangan adalah impor beras. Instrumen kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tataniaga tentang stabilisasi harga adalah harga dasar pembelian gabah dan beras. pada Inpres No 9

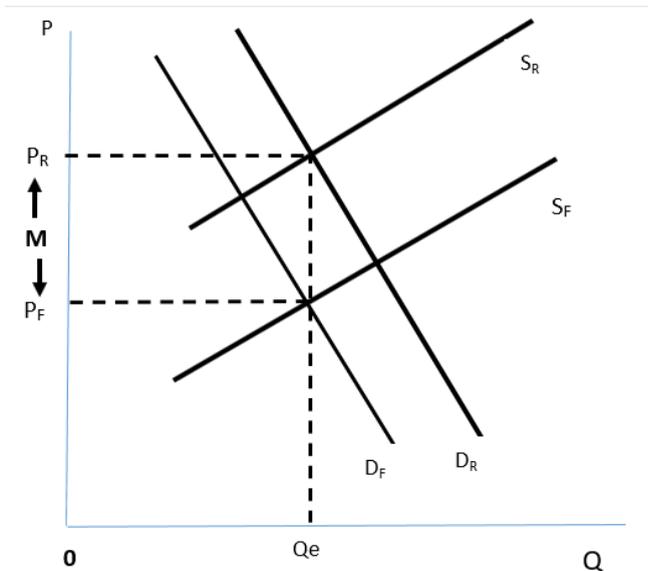
tahun 2001 dan No 9 tahun 2002, sedangkan pada Inpres No 2 tahun 2005 instrumen kebijakan haargaa dasar pembelian gabah dan beras berubah menjadi harga pembelian pemerintah.

## **Margin Tataniaga tanpa dan dengan Campur Tangan Pemerintah**

---

Tataniaga adalah kegiatan perpindahan barang dari produsen dan konsumen Pada umumnya petani memasarkan hasil usahataniya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan petani menjual hasil usahataniya berdasarkan harga pasar. Harga di tingkat petani ( $P_F$ ) merupakan perpotongan kurva permintaan di tingkat petani dengan kurva penawaran di tingkat petani. Harga di tingkat pengecer ( $P_R$ ) merupakan perpotongan kurva permintaan di tingkat pengecer dengan kurva penawaran di tingkat pengecer. Marketing margin ( $M$ ) adalah perbedaan harga di petani ( $P_F$ ) dan harga di pengecer ( $P_R$ ).

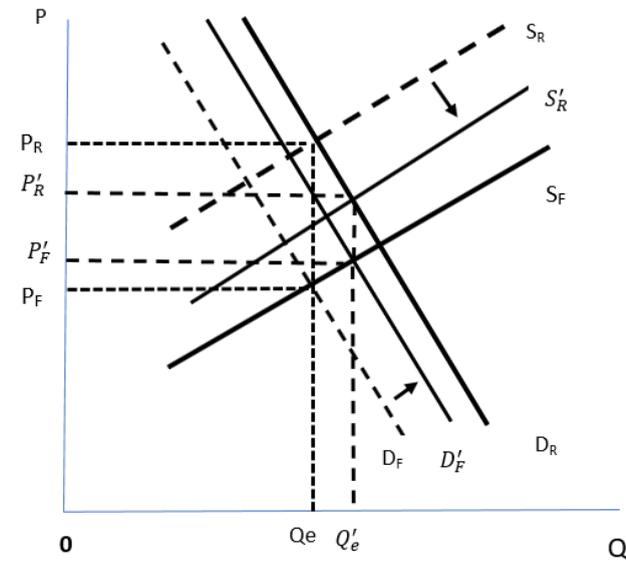
Nilai marketing margin pada Gambar 1 adalah perbedaan harga pada dua sistem tataniaga dikali dengan jumlah produk yang dipasarkan, yaitu  $(P_R - P_F) \times Q_e$ . Nilai marketing margin tersebut terbagi dua komponen yaitu biaya untuk kegiatan tataniaga (*marketing costs*) dan *marketing charges*.



**Gambar 1.** Margin Tata Niaga tanpa campur tangan pemerintah

*Sumber: Ellis, 1992; Dale C and Hammond, Jerome W, 1977*

Salah satu tujuan kebijakan tataniaga adalah menurunkan margin tataniaga. Hasil penelitian di Philippina menunjukkan harga komoditi pertanian meningkat dengan adanya pembuatan jalan Mosher (1987). Teknologi transportasi yang berkembang menurunkan biaya transportasi. (Hill, 1991). Fungsi pengangkutan merupakan komponen penting dalam kegiatan tataniaga.



**Gambar 2.** Margin Tata Niaga dengan Campur tangan pemerintah

*Sumber: Ellis, 1992; Dale C and Hammond, Jerome W, 1977*

Penurunan biaya transportasi menyebabkan kurva permintaan di tingkat petani ( $D_F$ ) bergeser ke kanan ( $D'_F$ ) sedangkan kurva penawaran di tingkat petani ( $S_F$ ) tetap (Gambar 2). Penurunan biaya pengangkutan juga menyebabkan kurva penawaran di tingkat pengecer (SR) bergeser ke ke kanan ( $D'_R$ ). Penurunan biaya pengangkutan tidak mempengaruhi biaya di tingkat petani, karena kurva  $S_F$  tetap.

Penurunan biaya tataniaga menyebabkan harga di tingkat pengecer turun dari  $P_R$  menjadi  $P'_R$  sedangkan harga di tingkat petani naik dari  $P_F$  menjadi  $P'_F$  dan jumlah barang yang dipasarkan meningkat dari  $Q_e$  menjadi  $Q'_e$ . Dengan campur tangan pemerintah melalui pembangunan transportasi menyebabkan marketing margin ( $P'_R - P'_F$ ) lebih kecil dibandingkan tanpa campur tangan pemerintah ( $P_R - P_F$ ).

Marketing margin yang lebih kecil mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan konsumen akan meningkatkan

share diterima petani dari setiap barang dibeli konsumen. Tinggi rendah farmer's share diterima petani ditentukan elastisitas kurva permintaan dan penawaran. Jika kurva penawaran lebih inelastis dari kurva permintaan maka campur tangan pemerintah menyebabkan semakin besar dampaknya terhadap tingkat harga petani, sebaliknya kurva permintaan yang lebih inelastis terhadap kurva penawaran maka campur tangan pemerintah lebih berdampak kepada harga di tingkat pengecer dari harga di tingkat petani.

## Saluran Tataniaga tanpa dan dengan Campur Tangan Pemerintah

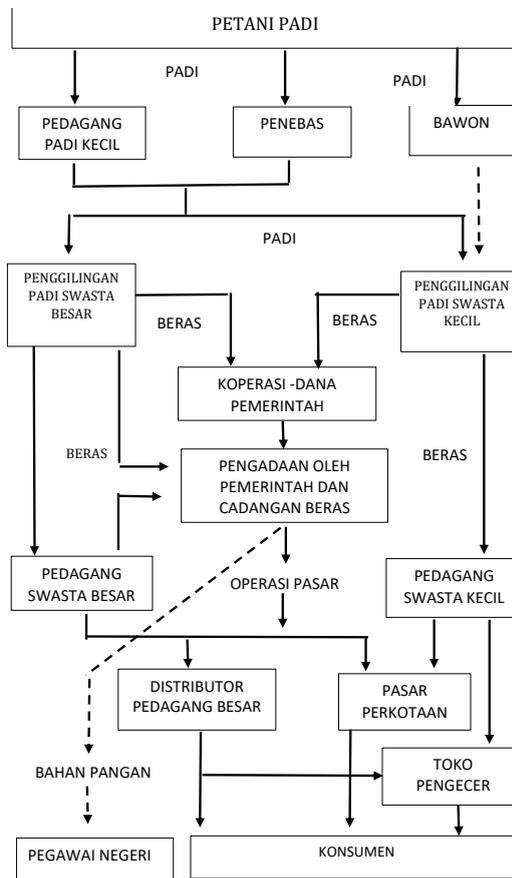
---

Mubyarto (1989) menguraikan perbedaan saluran tataniaga beras antara swasta dan pemerintah. Beras yang diperdagangkan dengan saluran swasta memiliki saluran tataniaga yang berbeda dengan saluran pemerintah. Saluran tataniaga saluran swasta: petani → pedagang penggiling desa → pedagang besar → pedagang pengecer → konsumen. Tidak ada perbedaan saluran pemasaran swasta dan pemerintah dari petani ke pedagang besar. Saluran tatniaga pemerintah setelah pedagang besar diteruskan ke Dolog → kantor pemerintah kemudian konsumen. dan Beras di Bulog disimpan sebagai stok pemerintah untuk keperluan anggota TNI, pegawai negeri dan perusahaan negara dan sebagian lagi untuk buffer stok nasional.

Gambar 3 menunjukkan tataniaga beras di Indonesia. Pemerintah menerapkan harga minimum (*floor price*) untuk padi dan harga maksimum (*ceiling price*) terhadap beras. Pengadaan beras oleh pemerintah sebesar 5 persen dari output total atau sekitar 1,5 juta ton beras, pada harga minimum. Petani menjual padi ke pedagang kecil atau ke penebas (yang membeli padi di usahatani). Padi juga ke sistem pasar lewat sistem bawon (tenaga kerja panen menerima upah dalam bentuk gabah dari jumlah panen).

Jika harga pasar mendekati harga minimum, pengadaan beras dari pedagang penggiling. Beras dalam proporsi besar ditransfer

ke lembaga koperasi, sebagai agen pemerintah untuk melakukan pengadaan beras dan menjual lebih tinggi dari harga minimum. Pada periode harga pasar lebih tinggi dari harga minimum, beras dengan bebas diperdagangkan oleh swasta dan beras disalurkan dari pedagang penggilingan ke pedagang besar atau pasar perkotaan ke pedagang pengecer dan konsumen. Pengadaan beras dan cadangan beras pemerintah disalurkan lewat dua cara: (1) operasi pasar, dan (2) penyediaan beras kepada pegawai negeri ( termasuk TNI). Beras dijual lewat operasi pasar dilakukan untuk menjaga harga beras maksimum pada musim paceklik.



**Gambar 3.** Saluran Tataniaga Beras di Indonesia

*Sumber: Ellis, 1992*

Saluran tataniaga dengan adanya campur tangan pemerintah berbeda dengan tanpa campur tangan pemerintah. Perbedaan tersebut terletak ada tidaknya instrumen kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pada saluran tataniaga tanpa campur tangan pemerintah tidak ditemukan adanya instrumen kebijakan sedangkan pada saluran tata niaga dengan campur tangan pemerintah ditemukan adanya instrumen kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan instrumen kebijakan.

## Daftar Pustaka

---

- Castle., Emery N. 1991. Competition and The Market. Agricultural Economics and Agribusiness Editor: Cramer, Gail L., Jensen, Clarence, G, 1991. . Jhon Wiley & Sons, Inc, New York
- Dahl, Dale C and Hammond, Jerome W. 1977. Market and Price Analysis. The Agricultural Industries. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Ellis, F. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ghatak, S and Ingersent K 1984. Agriculture and Economic Development. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.
- Hill, Lowell D. 1991. Marketing Agricultural Commodities. Agricultural Economics and Agribusiness Editor: Cramer, Gail L., Jensen, Clarence, G, 1991. Jhon Wiley & Sons, Inc, New York
- InternationalCenter for Applied Finance and Economics dan LPPM IPB. 2018. Final Report. Market Studi on Food Sector in Indonesia. [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Market\\_Study\\_Report\\_JICA.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Market_Study_Report_JICA.pdf)
- Master., William A. 2011. Economic Development, Government Policies, and Food Consumption. The Oxford handbook of The Economics of Food Consumption and Policy. Edited by:

- Lusk, Jayson L., Roosen, J., Shogren, Jason F. Oxford University Press, New York.
- Mosher, AT. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Penerbit Yasaguna, Jakarta.
- Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Edisi 3. Jakarta.
- Norton, RD. 2004. Agricultural Development Policy: Concepts and Experience. Jhon Wiley & Sons Inc, River Street, Hoboken.
- Norton, George W., Alwang, J dan Masters, William A. 2006. Economics of Agricultural Development. Routledge Taylor & Francis Group, New York and London.
- Sadoulet, E and Janvry Alain de.1995. Quantitative Development Policy Analysis. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Sembiring, SA. 2021. Kebijakan Perberasan Berdasarkan Instruksi Presiden: Tujuan-Kendala-Instrumen Kebijakan dan Implementasinya. Penerbit Nem, Pekalongan.
- Sembiring, S A, Deras, S., Sinaga, M. 2021. Aliran Barang Jasa dan Tunai Usahatani Padi Sawah dengan Sektor Rumah tangga dan Sektor lainnya. Jurnal Agriust, Vol 1 No 2. And Income Policies
- Timmer., C Peter. 1987. The Relationship between Price Policy and Food marketing. Food Policy: Integrating Supply, Distribution and Consumption. Edited by: Gittinger, J Price, Leslie, J, Hoisington, C. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Tomeck , WG and Robinson, KL. 1990. Agricultural Product Price. Third Edition. Cornell University Press, London.
- Tweeten, Luther G. 1991. Agricultural Price and Income Policies. Agricultural Economics and Agribusiness Editor: Cramer, Gail L., Jensen, Clarence, G, 1991. . Jhon Wiley & Sons, Inc, New York



## **BAB 7.**

# **PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN**

*Oleh : Reyna Virginia Nona*

### **Pendahuluan**

---

Sebagai suatu Negara yang berdaulat maka Pemerintah Indonesia berkewajiban mengatur pembangunan bangsa ini yang meliputi berbagai bidang kehidupan manusia termasuk hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha agar adanya perubahan atau pertumbuhan yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah yang meliputi berbagai aspek yang multidimensional.

Salah satu aspek dalam pembangunan bangsa adalah pembangunan pertanian. Hal ini tentunya didasarkan pada adanya potensi di sektor pertanian yang dimiliki Negara Indonesia. Adapun potensi pembangunan yang berasal dari sektor pertanian adalah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup atau memiliki mata pencahariannya pada sektor pertanian sebagai petani, nelayan, dan peternak. Selain itu potensi pertanian juga berupa sumber daya

alam, dimana Negara Indonesia merupakan Negara agraris, memiliki sumber daya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti hasil pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sebagai Negara yang memiliki potensi pertanian maka menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan keberlanjutannya sehingga menjadi sumber penghidupan bagi generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Pembangunan juga harus merupakan suatu proses yang tanpa akhir, yang berarti berkelanjutan dan selalu dilakukan karena kehidupan manusia dan lingkungannya yang selalu bertumbuh sesuai dengan peradaban zamannya. Pembangunan juga merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, sehingga perlu pemikiran dan pertimbangan yang matang yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Pembangunan juga mencakup aspek yang multidimensional, yang berarti bahwa kegiatan pembangunan ditujukan pada terwujudnya pembangunan yang merupakan tujuan bersama dari bangsa Indonesia, sehingga tercapai tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan yang terencana.

Pembangunan mempunyai arti yang luas, meliputi peningkatan produksi dan perubahan komposisi produksi, perubahan penggunaan (distribusi) sumber daya produksi antar industri. Di samping itu, pembangunan juga mengacu pada perubahan model distribusi faktor-faktor produksi pada berbagai kelompok pelaku ekonomi selama kehidupan suatu masyarakat (Djoyohadikusumo, 1994).

## **Permasalahan Pertanian di Indonesia**

---

Terdapat beberapa persoalan yang masih dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan aspek

produksi, baik untuk usahatani, peternakan, dan penangkapan hasil laut, serta aspek distribusi.

**Adapun persoalan yang dihadapi pertanian Indonesia adalah:**

Sektor pertanian merupakan sektor penghasil pangan yang merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga persoalan sektor pertanian akan menjadi persoalan politik dan dapat mempengaruhi kestabilan sosial dan politik suatu pemerintahan atau negara (Nona *et al.*, 2019).

Sumber daya air dan sanitasi menjadi permasalahan pertanian Indonesia. Air menjadi salah satu aspek yang penting dalam pertanian, karena tanpa air maka tidak ada kehidupan, sehingga perlu dilakukan manajemen air yang baik bagi kegiatan pertanian.

Sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian; SDM pertanian kita masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan baik formal maupun non formal melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diperoleh petani, nelayan dan peternak. Masih sedikit mereka yang berpendidikan sarjana atau diploma yang menjadi petani, peternak dan nelayan. Namun dari sebagian kecil yang berpendidikan sarjana dan diploma telah menjadi petani, nelayan atau peternak yang sukses dan kemudian menjadi penggerak bagi kelompok masyarakat di sekitarnya. Masih banyak kaum muda yang memiliki pendidikan tinggi yang enggan berorientasi menjadi petani, peternak atau nelayan. Sementara itu terdapat banyak bimbingan teknis, pelatihan dan bahkan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di sektor pertanian yang dapat diakses dimasa kini dengan adanya digitalisasi. Informasi terkait usahatani, peternak maupun nelayan dapat dengan mudah diakses. Guna mencapai kesuksesan dalam kegiatan usahatani, ternak maupun nelayan memang dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan untuk benar-benar berkeja dan mencintai pekerjaannya. Contohnya banyak peternak yang sukses usahanya karena memanfaatkan internet untuk berada dalam grup peternak dan dari sini akan banyak informasi bahkan

sampai pemesanan bibit yang dapat diperoleh dengan harga yang lebih baik, serta mendapatkan *sharing* pengalaman untuk mengatasi persoalan dalam bisnis peternak.

SDM petani juga berkaitan dengan minimnya kemampuan untuk mengakses teknologi dan informasi. Masih terdapat daerah-daerah di pedalaman Negara kita yang belum secara mudah mendapatkan akses internet. Apalagi jika pendidikan yang rendah tentunya akan sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk mengakses informasi melalui internet.

Pendidikan dan pelatihan juga belum semuanya diperoleh petani, peternak atau nelayan kita. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua bergabung dalam kelembagaan tani, peternak atau nelayan, sehingga agak sulit mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan pendidikan dan keterampilannya. Bagi yang telah mengenal dan terbiasa menggunakan teknologi digitalisasi tentu tidak kesulitan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya sehingga menjadi petani, peternak atau nelayan yang maju (Nona, 2022).

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pertanian Indonesia adalah pemasaran dan distribusi. Produk pertanian merupakan produk yang tidak tahan dan mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, daging dan ikan, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi dalam distribusinya sehingga tetap terjaga dan tidak mudah rusak.

Belum semua petani tergabung dalam kelembagaan tani juga menjadi permasalahan pertanian di Indonesia. Penyuluhan dan pendampingan, serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan melalui kelembagaan tani seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Selain itu juga permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya penguatan kelembagaan tani sehingga dapat berfungsi secara baik bagi pemenuhan kebutuhan kelompok tani (Nona and Juniasih, 2020).

Luas lahan petani yang sempit menjadi salah satu persoalan bagi sebagian besar petani di Indonesia. Selain itu letak kemiringan dan tingkat kesuburan tanah juga menjadi persoalan lain yang

juga dihadapi dalam pertanian Indonesia. Untuk itu maka perlu adanya kepastian hukum atas hak milik tanah dan alih fungsi lahan. Keterbatasan sumber daya alam yakni tanah yang akan dijadikan lahan pertanian perlu diperkuat dengan aturan akan adanya alih fungsi lahan khususnya bagi pembangunan industri atau perumahan sehingga lahan pertanian tetap tersedia.

Permasalahan produktivitas pertanian, masih menjadi persoalan pertanian Indonesia. Petani kita masih menanam aneka tanaman sehingga tidak memperhitungkan tanaman mana yang benar-benar memberikan keuntungan baginya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani, dan nelayan serta mewujudkan transformasi ekonomi.

Biaya produksi yang tinggi di sektor pertanian masih menjadi persoalan pertanian Indonesia. Hal ini terjadi karena mahalnya sewa lahan dan sewa tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini juga berkaitan dengan engganannya angkatan kerja untuk bekerja di sektor pertanian sehingga biaya sewa tenaga kerja menjadi mahal. Di samping itu kemampuan financial petani untuk menggunakan teknologi di sektor pertanian masih rendah akibat biaya untuk memperolehnya yang mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh petani kita.

Permasalahan lainnya yang dihadapi pertanian Indonesia adalah industri pertanian Indonesia masih bersifat padat karya, dan belum secara optimal memanfaatkan teknologi pertanian. Kemampuan untuk memiliki alat-alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani masih merupakan persoalan karena harganya yang mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh petani.

Petani hanya memperoleh pendapatan setiap musim panen, sedangkan pengeluaran rumah tangga petani harus dilakukan setiap hari, dan bahkan kadang siatnya mendesak, sehingga menjadi permasalahan dalam pertanian Indonesia.

Petani menyimpan hasil panen yang besar untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit sesuai keperluannya, sehingga karena padatnya penduduk maka lahan milik petani menjadi sangat sempit sehingga hasil bersih tidak cukup untuk hidup layak sepanjang tahun.

Aspek sosial budaya yang sangat dipegang teguh dalam masyarakat yang mana menjadi kebutuhan yang mendesak bagi petani, seperti upacara kematian dan pernikahan atau upacara kemasyarakatan lainnya yang kemudian menuntut petani untuk melakukan pengeluaran untuk biaya-biaya sosial ini.

Masih terdapat petani, nelayan atau peternak yang terjerat dalam permainan para tengkulak, sehingga petani tidak memiliki *bargaining* atau posisi tawar yang kuat terhadap produk hasil pertaniannya.

Kurangnya peralatan tangkap ikan yang dimiliki para nelayan Indonesia, dan harga jual ikan yang rendah juga menjadi permasalahan pertanian di Indonesia.

Permasalahan distribusi pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian yang menyebabkan gagal panen atau panen berkurang, serta tempat penyimpanan selama distribusi yang kemudian menjadikan mahal biaya distribusi produk pertanian kita, apalagi daerah kita yang berpulau-pulau sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca yang baik untuk distribusi produk pertanian.

## **Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian**

Pemerintah berperan penting dalam pembangunan pertanian. Peran pemerintah dalam pembangunan bangsa jelas diatur dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden, (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Gubernur dll. Semua ini dimaksudkan agar pembangunan disektor pertanian dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan pemerintah dan tentunya memiliki tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Pemerintah dapat berperan dalam pembangunan pertanian melalui berbagai kebijakan, misalnya melalui Program Pemberdayaan Petani dalam berbagai kegiatan di sektor pertanian. Program pemberdayaan masyarakat petani, nelayan dan peternak perlu didasarkan pada potensi-potensi yang ada di daerah masing-

masing, baik SDA maupun SDM. Kebijakan pemerintah hendaknya diarahkan pada keterlibatan petani, nelayan dan peternak secara sukarela dan penuh kesadaran dalam pengambilan keputusan mulai dari pengambilan keputusan pada proses perencanaan (identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dll), pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses tersebut di atas maka petani, nelayan dan peternak perlu mengembangkan potensi SDM melalui pendidikan formal dan non formal sehingga adanya peningkatan keterampilan dan wawasannya ini dapat menyebabkan peran aktif petani, nelayan dan peternak sebagai subyek dalam kegiatan-kegiatan pembangunan (Nona *et al.*, 2019).

Di samping itu pemerintah perlu mendorong atau memotivasi petani, nelayan dan peternak sehingga senantiasa tumbuh kesadarannya akan pentingnya ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan pertanian yang merupakan potensi terbesar Indonesia sebagai negara agraris.

Pemerintah juga berperan memfasilitasi agar adanya peningkatan kemampuan petani dalam kegiatan usaha tani yang lebih, yang dapat dilakukan melalui: Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani khususnya kelompok tani (Anantanyu, 2011).

Pemerintah dapat berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak melalui wadah kelembagaan tani, agar melalui wadah kelembagaan tani sebagai tempat membina diri dan komunitasnya, sebagai tempat belajar, sebagai tempat menyelesaikan masalah, sebagai tempat mengelola inovasi dan kreativitas, serta sebagai wadah untuk belajar bersama dan memperoleh bantuan dari berbagai mitra termasuk pemerintah.

Upaya peberdayaan petani dan kelembagaan tani tidak saja untuk meningkatkan SDM petani, nelayan dan peternak tapi lebih dari itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian kita dengan produk dari luar negeri. Pemerintah berperan memfasilitasi baik kebutuhan teknis seperti alsintan, dan faktor-faktor produksi tetapi juga berupaya agar produk yang dihasilkan adalah bermutu sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Tentu saja daya saing ini bisa diperoleh dengan adanya distribusi dan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Tata niaga bagi produk pertanian diatur pemerintah agar melindungi produsen dan konsumen dalam negeri.

Pada dasarnya persaingan bebas yang sempurna di pasar adalah tidak ada, dan pemerintah berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berperan mempengaruhi pasar. Peran pemerintah dapat berbentuk sebagai pengatur (*regulating policies*), pemerataan pendapatan (*distributive policies*). Sebagai pengatur maka pemerintah berperan dalam distribusi pupuk agar tercapai pemerataan dan pemenuhan kebutuhan. Fungsi pemerintah dalam pemerataan pendapatan dapat dilihat dari penentuan harga minimum gula misalnya untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas pendapatan. Juga bisa berbentuk penentuan harga maksimum misalnya harga minyak dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri. Tinggi rendahnya harga maksimum dan minimum berpengaruh pada bagian yang diterima semua pihak yang terlibat baik produsen, distributor maupun konsumen.

Peran pemerintah dalam kebijakan pertanian yang lebih spesifik meliputi: kebijaksanaan harga, kebijaksanaan pemasaran, kebijaksanaan struktural, dan bidang-bidang khusus pengaturan kelembagaan baik di dalam maupun di luar sektor pertanian. Dengan demikian maka pemerintah berperan dalam sektor pertanian melalui kebijaksanaan harga dan pendapatan yang disebut dengan *Price and income policy*, yang bertujuan dari aspek harga untuk menjaga stabilitas harga sedangkan dari sisi pendapatan bertujuan agar

pendapatan tidak berfluktuasi yang tajam. Kebijakan pemasaran diarahkan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen yang bertujuan memperkuat daya saing petani kita. Pemerintah juga mengatur menciptakan persaingan yang sehat diantara pedagang dan melayani kebutuhan petani yang berkaitan dengan sarana produksi agar harganya tidak melonjak tinggi. Kebijakan structural dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait.

Pemerintah juga berperan menghubungi petani dengan industri yang memanfaatkan produk pertanian sebagai input dalam proses produksinya. Melalui kemitraan ini pemerintah berperan sebagai fasilitator sehingga memastikan hak-hak petani dapat diperhatikan dan industri tetap dapat berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian maka dapat disimpulkan bahwa:

Pada dasarnya pemerintah ikut menjaga agar setiap warga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang diproduksi dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, dan para pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi pun mendapatkan keuntungan agar roda perekonomian tetap berjalan.

Petani perlu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sehingga program dan kebijakan pemerintah terkait sector pertanian yang melibatkan petani dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, serta perlunya kerjasama yang sinergis antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian, naik petani, sector swasta dan pemerintah serta dunia Pendidikan agar dapat seiring sejalan membangun pertanian Indonesia.

## Daftar Pustaka

---

- Djoyohadikusumo, S. (1994), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Nona, R.V., Ambarawati, I.G.A.A., Darmawan, D.P. and Budiasa, I.W. (2019), “Realizing Regional Food Security Through Community Food Business Development in East Nusa Tenggara Province, Indonesia”, *International Journal of Agriculture System*, Vol. 6 No. 2, p. 146, doi: 10.20956/ijas.v6i2.1593.
- Nona, R.V. and Juniasih, I.A.K. (2020), “Analisis Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Penyuluha Pertanian Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Litbang Pertanian*, pp. 151–162.
- S. Anantanyu. (2011), “Kelembagaan Petani, Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya”, *SEPA*, Vol. 7 No. 2, pp. 102–109.



## **BAB 8.**

# **PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PETANI SAWAH**

*Oleh : Bayu Mahendra*

### **Pendahuluan**

---

Menurut(Thorstein Veblen 1899) kelembagaan merupakan cara pandang, cara berpikir sekelompok manusia dalam sebuah wadah hingga menjadi budaya yang disepakati. Lebih jauh kedepan pada tahun 1990 melalui bukunya yang berjudul *Governing the Commons* Elinor Ostrom menyebutkan bahwa Kelembagaan adalah suatu peraturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat yang mengatur tentang siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan pendapat, apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan dalam suatu rapat, undang-undang apa yang berlaku bagi mayoritas penduduk, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang harus disediakan dan penghargaan apa yang akan diterima individu sebagai hasil dari

diskusi yang berlangsung (Ostrom 1990). Pandangan Ostrom inilah yang mempengaruhi ilmu politik dan ekonomi hingga sekarang.

Lembaga pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak masa penjajahan Belanda. Cultuurstelsel, sistem tanam paksa, pada waktu itu didirikan oleh Belanda. Orang Indonesia dipaksa oleh sistem ini untuk membudidayakan tanaman komersial seperti kopi, teh, dan nilam. Belanda juga memperkenalkan teknik pertanian tembakau dan tebu, yang akhirnya cepat diadopsi oleh Indonesia.

Organisasi petani Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mendongkrak hasil pertanian, kelompok tani ini didirikan oleh dan untuk petani. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah komunikasi antara peserta program dan pelaksana program serta sebagai wahana penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah. Menurut data Badan SDM-Deptan pada tahun 2008, terdapat lebih kurang 260.587 kelompok tani di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut tergolong dalam kelas madya dan kelas lanjut adalah 71.921 kelompok. sehingga terdapat 188.666 yang masih perlu ditingkatkan kualifikasinya.

## **Perkembangan Kelembagaan**

---

Kelembagaan di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Berikut adalah gambaran singkat tentang perkembangan kelembagaan di Indonesia:

1. Era Pra-kemerdekaan: Pada masa ini, kelembagaan di Indonesia masih didominasi oleh sistem kolonialisme Belanda. Beberapa organisasi politik dan sosial yang ada pada masa ini antara lain Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan Gerakan Pemuda.
2. Era Kemerdekaan: Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, berbagai lembaga negara dibentuk seperti MPR, DPR, dan pemerintahan daerah. Selain itu, juga terbentuk lembaga-

lembaga non-pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, serikat buruh, dan organisasi profesi.

3. Era Orde Lama: Pada masa ini, kelembagaan di Indonesia banyak diwarnai oleh sentralisasi kekuasaan dan pengendalian politik oleh pemerintah. Sejumlah lembaga yang dibentuk pada masa ini antara lain Golkar, BKKBN, dan lembaga-lembaga pembangunan lainnya.
4. Era Reformasi: Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang membawa perubahan signifikan pada kelembagaan negara. Beberapa lembaga baru yang dibentuk pada masa ini antara lain KPK, Ombudsman, dan Badan Kepegawaian Negara.
5. Era saat ini: Kelembagaan di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan banyaknya organisasi dan lembaga yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap korupsi dan kecurangan melalui berbagai lembaga yang ada.

Seiring berjalannya waktu kelembagaan di Indonesia juga mengalami perkembangan dan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Berikut teori kelembagaan yang dikembangkan diberbagai negara:

1. Institutionalism - Thorstein Veblen: Teori ini menekankan bahwa kelembagaan adalah bagian penting dari masyarakat yang mempengaruhi tindakan individu dan pengambilan keputusan. Veblen berpendapat bahwa kelembagaan cenderung menjaga status quo dan menghambat perubahan dalam masyarakat.
2. Institutional Economics -(Harris 1952): Commons mengembangkan teori ekonomi kelembagaan yang menekankan pentingnya institusi dalam mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Teori ini mengakui peran penting institusi dalam mengatur pasar dan mendorong koordinasi sosial.

3. Neo-Institutionalism - (Mailänder et al. 1991): Teori ini menekankan bahwa institusi adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan sosial. North berpendapat bahwa institusi memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku individu dan bahwa mereka harus dipelajari dari sudut pandang historis.
4. Sociological Institutionalism - (DiMaggio and Powell 1983): Teori ini menekankan pentingnya norma, nilai, dan budaya dalam membentuk kelembagaan. DiMaggio dan Powell berpendapat bahwa kelembagaan dibentuk oleh interaksi sosial, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat
5. Critical Institutionalism - (Kelly and Dobbin 1998): Teori ini menekankan pentingnya memahami kelembagaan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Dobbin berpendapat bahwa kelembagaan dapat diubah melalui perubahan sosial dan politik yang lebih besar, dan bahwa kelembagaan dapat dipahami sebagai produk dari konflik dan kompromi di antara kelompok kepentingan yang berbeda.

Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Seiring dengan perkembangan zaman, kelembagaan dalam pertanian Indonesia juga mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah artikel yang membahas kaitan antara perkembangan kelembagaan dalam pertanian di Indonesia.

Pada era pra-kemerdekaan, sistem pertanian Indonesia didominasi oleh sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk lembaga-lembaga seperti Departemen Pertanian dan Lembaga Penyuluhan Pertanian (LPP) untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Namun, pada masa Orde Lama, kelembagaan pertanian masih terpusat pada pemerintah dan kelompok-kelompok elit.

Setelah Indonesia mengalami reformasi politik pada tahun 1998, banyak perubahan terjadi dalam kelembagaan pertanian Indonesia. Pemerintah mulai memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga pertanian seperti Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Badan Karantina Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan dan Gizi (BKPG). Selain itu, muncul juga organisasi petani, seperti Asosiasi Petani Indonesia (API), yang membantu mengorganisir dan memperjuangkan hak-hak petani. (Pertanian 2021)

Namun, meskipun ada kemajuan dalam kelembagaan pertanian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perubahan iklim yang semakin tidak dapat diprediksi, yang mempengaruhi produktivitas pertanian di Indonesia. Selain itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani masih harus ditingkatkan, karena masih banyak petani yang hidup dalam kemiskinan.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, kelembagaan pertanian Indonesia perlu terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan akses petani ke teknologi pertanian yang modern dan meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, petani, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam sektor pertanian.

Dalam kesimpulannya, perkembangan kelembagaan dalam pertanian Indonesia sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, petani, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia.

## Modal Sosial Pertanian

---

Terdapat tujuh teori penting dalam modal sosial, berikut adalah tujuh teori modal sosial:

1. Teori Struktural: Teori ini mengacu pada kekuatan jaringan sosial yang terdiri dari hubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Struktur sosial, seperti ikatan keluarga, hubungan bisnis, dan pertemanan, mempengaruhi jenis dan tingkat modal sosial yang dapat dikembangkan dalam suatu masyarakat.
2. Teori Aksi Sosial: Teori ini menyatakan bahwa modal sosial berkaitan erat dengan aksi sosial dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, semakin besar modal sosial yang dapat dikembangkan dalam suatu masyarakat.
3. Teori Kolektif: Teori ini berfokus pada nilai-nilai dan norma sosial yang dibagikan oleh masyarakat dan mempengaruhi pembentukan modal sosial. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma yang kuat cenderung memiliki modal sosial yang lebih kuat pula.
4. Teori Kontekstual: Teori ini berfokus pada konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat yang mempengaruhi pembentukan modal sosial. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan tingkat ketimpangan sosial mempengaruhi pembentukan modal sosial dalam suatu masyarakat.
5. Teori Komunikasi: Teori ini berfokus pada pentingnya komunikasi dalam membentuk modal sosial. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara anggota masyarakat memperkuat hubungan sosial dan membantu membentuk modal sosial yang kuat.
6. Teori Interaksi Simbolis: Teori ini mengacu pada pentingnya makna sosial dalam membentuk modal sosial. Makna sosial yang diberikan pada tindakan dan hubungan sosial membentuk

modal sosial yang berkaitan dengan budaya dan tradisi suatu masyarakat.

7. Teori Kepercayaan: Teori ini mengacu pada pentingnya kepercayaan dalam membentuk modal sosial. Kepercayaan yang dibangun antara anggota masyarakat membentuk hubungan sosial yang lebih kuat dan membantu membentuk modal sosial yang lebih besar.

Modal sosial adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan dan potensi kolaboratif yang ada di antara anggota masyarakat. Dalam konteks pertanian Indonesia, modal sosial sangat penting untuk memperkuat hubungan antara petani dan lembaga-lembaga pertanian serta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Berikut adalah artikel yang membahas hubungan antara modal sosial dan pertanian di Indonesia.

Salah satu contoh modal sosial dalam pertanian Indonesia adalah jaringan kerjasama antara petani dengan pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, modal sosial dapat diartikan sebagai hubungan dan interaksi sosial yang terjalin antara berbagai aktor yang terlibat dalam produksi pertanian. Dalam kerjasama ini, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai pemberi bantuan teknis dan sumber daya finansial untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian mereka.

Keberadaan modal sosial ini memberikan banyak manfaat bagi petani dan juga pemerintah. Bagi petani, modal sosial memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya dan teknologi pertanian yang lebih canggih dan memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola pertanian. Sementara itu, bagi pemerintah, modal sosial dapat membantu mereka meningkatkan efektivitas program-program pertanian dan meningkatkan partisipasi petani dalam kebijakan pertanian.

Selain itu, modal sosial juga memainkan peran penting dalam memperkuat keberlanjutan pertanian di Indonesia. Dalam konteks ini, modal sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dan kemauan masyarakat untuk mempertahankan keberlanjutan sistem pertanian yang ada. Dalam hal ini, modal sosial melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pertanian dan lingkungan.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, modal sosial juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya yang dapat menghambat partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam kegiatan pertanian. Selain itu, modal sosial juga dapat rentan terhadap perpecahan dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. (Mahendra and Priambodo 2022)

Dalam kesimpulannya, modal sosial memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara petani, lembaga-lembaga pertanian, dan pemerintah. Modal sosial juga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta memperkuat keberlanjutan sistem pertanian di Indonesia. Namun, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertanian dan memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh modal sosial. (Mahendra 2019)

Modal sosial merupakan konsep yang penting dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Dalam konteks petani padi, modal sosial dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha tani, serta mampu membangun komunitas petani yang lebih kuat dan solid. Dalam artikel ini, akan dijelaskan mengenai modal sosial petani padi dan pengaruhnya terhadap pertanian di Indonesia.

Petani padi di Indonesia umumnya tergolong sebagai petani kecil yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan utama. (Septiadi and Joka 2019) Petani padi sering menghadapi berbagai

tantangan seperti fluktuasi harga, cuaca yang tidak menentu, dan masalah kualitas tanah dan air. Namun, dengan adanya modal sosial, petani padi mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut dan mencapai keberhasilan dalam produksi padi. (Mahendra, Suprpto, and Barima 2021)

Modal sosial yang dimiliki oleh petani padi terdiri dari beberapa aspek, seperti jaringan sosial, kepercayaan, norma dan nilai, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Jaringan sosial yang kuat dan terbuka memungkinkan petani padi untuk berinteraksi dengan petani lain dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu, kepercayaan yang kuat antara petani padi dan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, dan lembaga keuangan, memperkuat kerjasama dan membantu membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Norma dan nilai yang kuat juga memainkan peran penting dalam membentuk modal sosial petani padi. Budaya gotong royong dan saling membantu yang dianut oleh masyarakat petani padi membantu membangun kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungan masyarakat petani padi memperkuat pengaruh petani dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pada level komunitas, modal sosial petani padi memungkinkan terciptanya kerjasama dan kolaborasi antara petani padi dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat kapasitas petani padi dalam mengelola usaha tani mereka, memperkuat keberlanjutan usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Dalam rangka membangun modal sosial yang kuat, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran petani padi tentang pentingnya modal sosial dalam memperkuat usaha tani mereka.
2. Meningkatkan partisipasi petani padi dalam kegiatan sosial dan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional.

3. Meningkatkan kerjasama antara petani padi dan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, dan organisasi nirlaba.
4. Meningkatkan penggunaan teknologi pertanian yang berkelanjutan

Modal sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha tani, termasuk di dalamnya adalah pertanian jagung. Petani jagung di Indonesia membutuhkan modal sosial yang kuat untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, keberlanjutan usaha tani yang lebih baik, serta terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan antara petani jagung dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, akan dijelaskan mengenai modal sosial petani jagung dan pengaruhnya terhadap pertanian di Indonesia.

Petani jagung di Indonesia memiliki tantangan dalam berbagai aspek, seperti perubahan iklim, perubahan kebijakan pemerintah, dan perubahan pasar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, petani jagung membutuhkan modal sosial yang kuat. Modal sosial terdiri dari aspek-aspek seperti jaringan sosial, kepercayaan, norma dan nilai, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

Jaringan sosial yang kuat memungkinkan petani jagung untuk berinteraksi dengan petani lainnya, dan dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, pengusaha, dan lembaga keuangan. Dengan adanya jaringan sosial yang kuat, petani jagung dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu, jaringan sosial yang terbuka dan inklusif dapat memperkuat kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Kepercayaan juga memainkan peran penting dalam membentuk modal sosial petani jagung. Kepercayaan antara petani jagung dan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, pengusaha, dan lembaga keuangan, memperkuat kerjasama dan membantu membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Kepercayaan

yang terbangun juga memperkuat kemampuan petani jagung dalam memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Norma dan nilai yang kuat juga memainkan peran penting dalam membangun modal sosial petani jagung. Budaya gotong royong, saling membantu, dan kerjasama yang dianut oleh masyarakat petani jagung membantu membangun kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungan masyarakat petani jagung memperkuat pengaruh petani jagung dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pada level komunitas, modal sosial petani jagung memungkinkan terciptanya kerjasama dan kolaborasi antara petani jagung dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat kapasitas petani jagung dalam mengelola usaha tani mereka, memperkuat keberlanjutan usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 130.000 km<sup>2</sup> dan penduduk sekitar 160 juta jiwa. Pertanian sawah menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian di pulau Jawa, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Artikel ini akan membahas perkembangan petani sawah di Pulau Jawa. (BPS 2019)

Petani sawah di Pulau Jawa telah mengalami banyak perubahan dan transformasi dalam beberapa dekade terakhir. Pada masa lalu, petani sawah di pulau Jawa masih menggunakan teknologi tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern seperti pestisida dan pupuk sintetis. Petani sawah juga masih menggunakan sapi sebagai alat transportasi dan pengolahan lahan pertanian.

Namun, dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, petani sawah di Pulau Jawa mulai memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Penggunaan traktor dan mesin pertanian lainnya telah meningkatkan

efisiensi dan produktivitas usaha tani. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida modern juga telah meningkatkan kualitas dan jumlah hasil panen.

Peningkatan teknologi dan efisiensi usaha tani sawah juga didukung oleh program-program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Program-program tersebut, seperti program pemberdayaan petani dan program bantuan modal serta pendidikan, membantu petani sawah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani mereka. Program-program tersebut juga membantu petani sawah untuk mengakses sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani mereka.

Selain itu, perkembangan petani sawah di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pertanian. Kebijakan tersebut, seperti subsidi pupuk dan pengaturan harga pangan, mempengaruhi kesejahteraan petani sawah dan keberlangsungan usaha tani mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mendukung petani sawah dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun telah mengalami banyak perkembangan dan transformasi, petani sawah di Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, dan akses terbatas terhadap teknologi dan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan aksi kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk membantu petani sawah mengatasi tantangan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sawah di Pulau Jawa, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas petani, memperkuat jaringan sosial dan kemitraan, serta meningkatkan akses terhadap teknologi dan modal. Dengan demikian, petani sawah di Pulau Jawa dapat meningkatkan produktivitas.

Pertanian sawah telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menyediakan bahan pangan bagi masyarakat. (Direktorat et al. 2018) Petani sawah di

Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan transformasi dalam beberapa dekade terakhir. Pada masa lalu, petani sawah di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern seperti pupuk sintetis dan pestisida. Petani sawah juga masih menggunakan sapi sebagai alat transportasi dan pengolahan lahan pertanian. Namun, dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, petani sawah di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Penggunaan teknologi modern seperti mesin traktor, pupuk dan pestisida sintetis, dan alat-alat pengairan telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Petani sawah juga mulai menggunakan teknologi pertanian berbasis digital, seperti aplikasi mobile untuk memonitor kondisi tanaman dan manajemen lahan pertanian.

Perkembangan petani sawah di Indonesia juga didukung oleh program-program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Program-program tersebut, seperti program pemberdayaan petani dan program bantuan modal serta pendidikan, membantu petani sawah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani mereka. Program-program tersebut juga membantu petani sawah untuk mengakses sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani mereka.

Namun, meskipun telah mengalami banyak perkembangan, petani sawah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, dan akses terbatas terhadap teknologi dan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan aksi kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk membantu petani sawah mengatasi tantangan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawah dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani sawah di Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain, meningkatkan akses terhadap

teknologi dan modal, memperkuat kapasitas petani sawah melalui pelatihan dan pendidikan, dan memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sawah di Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas petani, memperkuat jaringan sosial dan kemitraan, serta meningkatkan akses terhadap teknologi dan modal. Dengan demikian, petani sawah di Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. (Mohammad Mulyadin, Surati, and Ariawan 2016) Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Salah satu komoditas pertanian yang sangat penting bagi Indonesia adalah padi. (Naufal, Krisnamurthi, and Baga 2022) Padi merupakan bahan pangan pokok yang menjadi sumber karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pengembangan petani sawah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan produksi padi dan mencapai swasembada pangan. Namun, pengembangan petani sawah tidak hanya terfokus pada aspek teknis produksi padi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan modal sosial petani sawah. (Biagini and Severini 2022)

Kelembagaan dan modal sosial merupakan dua faktor penting dalam pengembangan petani sawah. (Cafiero et al. 2007) Kelembagaan berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi dan koordinasi antara para petani, serta membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani sawah. Sedangkan modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial yang dimiliki oleh para petani sawah, termasuk di dalamnya norma-norma, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan dalam berinteraksi dan bekerja sama.

Pengembangan kelembagaan dan modal sosial petani sawah dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan partisipasi petani sawah dalam kegiatan kelembagaan yang sudah ada, seperti kelompok tani, koperasi, dan asosiasi petani sawah. Peningkatan partisipasi ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan pendampingan, serta memberikan insentif bagi para petani sawah yang aktif dalam kegiatan kelembagaan.
2. Pembentukan kelembagaan baru yang sesuai dengan kebutuhan petani sawah, seperti kelompok usaha bersama (KUB) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pembentukan kelembagaan baru ini dapat membantu memfasilitasi interaksi dan kerja sama antara para petani sawah dalam hal produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil pertanian.
3. Peningkatan modal sosial melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memecahkan konflik. Peningkatan modal sosial ini dapat membantu para petani sawah dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak lain, seperti konsumen, pedagang, dan pihak-pihak terkait lainnya.
4. Peningkatan akses petani sawah terhadap informasi dan teknologi pertanian yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses internet, pelatihan, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern.

Pengembangan kelembagaan dan modal sosial petani sawah telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

## Daftar Pustaka

---

- Biagini, Luigi, and Simone Severini. 2022. "How Does the Farmer Strike a Balance between Income and Risk across Inputs? An Application in Italian Field Crop Farms." *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 16098 14(23):16098. doi: 10.3390/SU142316098

- BPS. n.d. "BPS Provinsi Jawa Tengah." Retrieved February 23, 202 (https://jateng.bps.go.id).
- Cafiero, Carlo, Fabian Capitanio, Antonio Cioffi, and Adele Coppola. 2007. "Risk and Crisis Management in the Reformed European Agricultural Policy." *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne d'agroeconomie* 55(4):419–41. doi: 10.1111/j.1744-7976.2007.00100.x.
- DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review* 48(2):147. doi: 10.2307/2095101.
- Direktorat, Lahan, Jenderal Prasarana, Dan Sarana, and Pertanian Kementerian Pertanian. 2018. *Pedoman Teknis PENGEMBANGAN JALAN USAHATANI (Didalam Area Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices Flood Management in Selected River Basins Sector Project CS 05*.
- Harris, Abram L. 1952. "John R. Commons and the Welfare State." *Southern Economic Journal* 19(2):222. doi: 10.2307/1054773.
- Kelly, Erin, and Frank Dobbin. 1998. "How Affirmative Action Became Diversity Management: Employer Response to Antidiscrimination Law, 1961 to 1996." *American Behavioral Scientist* 41(7):960–84. doi: 10.1177/0002764298041007008.
- Mahendra, Bayu. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Csr Pt. Angkasa Pura I Yogyakarta (Studi Kasus Umkm Madu Hutan Raya Dan Mina Kembar)." *Jurnal Agercolere* 1(2):30–36. doi: 10.37195/jac.v1i2.62.
- Mahendra, Bayu, and Aji Priambodo. 2022. "Pengaruh Tumpangsari Kopi Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Dataran Tinggi Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah." *Jurnal Agercolere* 4(2):54–59. doi: 10.37195/JAC.V4I2.170.
- Mahendra, Bayu, Suprpto Suprpto, and Hima Barima. 2021. "PENGARUH PROGRAM KARTU TANI TERHADAP PENURUNAN BIAYA PUPUK PADA PETANI PADI." *Jurnal*

- AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*20(2):411–20. doi:10.31186/JAGRISEP.20.2.411-420.
- Mailänder, Elissa, Alexandra Oeser, Will Rall, and Julia Timpe. 1991. “Institutions.” *Journal of Economic Perspectives* 5(1):97–112. doi: 10.1257/JEP.5.1.97.
- Mohammad Mulyadin, Raden, Surati Surati, and Kuncoro Ariawan. 2016. “KAJIAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN: KASUS DI KAB. GUNUNG KIDUL.” *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 13(1):13–23. doi: 10.20886/JPSEK.2016.13.1.13-23.
- Naufal, Fathin Ahmad, Bayu Krisnamurthi, and Lukman Mohammad Baga. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi Lada Di Provinsi Lampung.” *Forum Agribisnis* 12(1):1–11. doi: 10.29244/fagb.12.1.1-11.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pertanian, Kementerian. 2021. *Pedoman Pelaksanaan UPLAND 2021*. Kementerian Pertanian.
- Septiadi, Dudi, and Umbu Joka. 2019. “Analisis Respon Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Beras Indonesia.” *Agrimor* 4(3):42–44. doi: 10.32938/ag.v4i3.843.
- Thorstein Veblen. 1899. *THE THEORY OF THE LEISURE CLASS*.



# BIODATA PENULIS



*Dr. Muhammad Juwanda, S.P., M.P.*

*Dosen Program Studi Agribisnis  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Muhadi Setiabudi*

Penulis lahir di Brebes tanggal 28 Juni 1985. Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhadi Setiabudi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman lulus 2009, melanjutkan S2 pada program studi Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2011 dan melanjutkan S3 pada program studi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2022.

### **Pengalaman Penelitian (10 tahun Terakhir):**

1. Peningkatan ketahanan bawang merah terhadap penyakit layu fusarium melalui induksi ketahanan dengan asam salisilat secara in vitro. (2016, Kerjasama dengan Bapperlitbangda Kab. Brebes)
2. Pengaruh jarak tanam dan pemberian dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (*Allium ascalonicum*, L). (Tahun 2015, mendapatkan dana hibah penelitian dosen pemula, Kemendikbud).
3. Inovasi Teknologi Pupuk Hayati dan Kompos Daun Bawang Merah untuk Meningkatkan Hasil Bawang Merah. (Tahun 2019, mendapatkan Hibah penelitian Doktor, Kemendikbudristek).
4. Soil properties and sulfur-oxidizing bacterial diversity in response to different planting patterns of shallot (*Allium ascalonicum*). (Tahun 2017, penelitian Disertasi Doktor).
5. Inovasi Pemberian Bakteri Pengoksidasi Sulfur Dan Kompos Daun Bawang Merah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan, Hasil Dan Alliin (S-Allyl-L-Cysteine) Umbi Bawang Merah. (Tahun 2022, Penelitian Disertasi Doktor).
6. The Long Composting Period Effect of leaf Shallots on The Compost Quality. (Tahun 2018, Penelitian Disertasi Doktor)
7. Karakterisasi Kemampuan Bakteri Indigenous Rhizosfer Pertanaman Bawang Merah Dalam Mengoksidasi Sulfur Menjadi Sulfat Pada Tanah Vertisol Di Brebes, Indonesia. (Tahun 2019, Penelitian Disertasi Doktor)

### **Publikasi**

1. Juwanda M, Sakhidin, Saparso, Kharisun. 2020. Soil properties and sulfur-oxidizing bacterial diversity in response to different planting patterns of shallot (*Allium ascalonicum*). Biodiversitas. 21(6):2832–9.
2. Juwanda M, Sakhidin, Saparso, Kharisun. 2022. The Long Composting Period Effect of leaf Shallots on The Compost Quality. IOP Conference Series: Earth and Environmental.

3. M Juwanda, K Khotimah, dan M Amin. 2016. Peningkatan ketahanan bawang merah terhadap penyakit layu fusarium melalui induksi ketahanan dengan asam salisilat secara in vitro. *Jurnal Agrin*. 20 (1).
4. Sakhidin, Kharisun dan Juwanda, M. 2019. Inovasi Teknologi Pupuk Hayati dan Kompos Daun Bawang Merah Untuk Meningkatkan hasil Bawang Merah. Prosiding Seminar Nasional, LPPM Universitas Jenderal Soedirman.
5. Juwanda, M dan Wadli. 2019. Pengaruh jarak tanam dan pemberian dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (*Allium ascalonicum*, L). *Jurnal Agrin*. 22(1), pp.56-65.



*Estherlina Sagajoka, SE., M.Si.*

*Dosen Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Flores*

Penulis lahir di Ende tanggal 08 Maret 1966. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores sejak tahun 2001 sampai sekarang, Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1989 dan melanjutkan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Kajian Kota Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010. Penulis Penelitian melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai spesifikasi bidang ilmu Ekonomi Pembangunan (perencanaan pembangunan dan kajian Kota. Penulis juga sudah menulis beberapa artikel yang dipublish dalam Jurnal Nasional terakreditasi, Book Chapter dari hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, juga Book Chapter Bahan ajar bidang ilmu Ekonomi Pembangunan., Selain sebagai dosen Penulis juga aktif dalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain Forum Perempuan lintas Agama Kabupaten Ende, Gerakan Pembumian

Pancasila kabupaten Ende, dan Dewan Pendidikan kabupaten Ende sampai saat ini.



*Dr. Ir. Gontom Citoro Kifli, M.Si.*

*Periset pada Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler  
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

Penulis lahir di Kota Bandung pada tahun 1968. Penulis adalah periset pada Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan memiliki kepakaran pada bidang *Farming systems*, ekonomi pertanian, dan komunikasi pembangunan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1992, dan lulus pendidikan tingkat magister di program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002, dan penulis menyelesaikan pendidikan doktoral pada program studi Komunikasi Pembangunan (PKP) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2015.

- Alamat email penulis: keevle354@gmail.com.



*Dwi P. Widiastuti, S.P., M.Sc., Ph.D.*

*Peneliti Ilmu Tanah, Hidrologi, dan Agroklimatologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

Penulis adalah peneliti pada Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan melanjutkan S2 dan S3 pada jurusan Soil and Crop Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.

Penulis menekuni bidang penelitian dengan konsentrasi di bidang Pengelolaan Lahan, Air, dan Iklim, utamanya Kesuburan Kimia dan Biologi Tanah. Karya tulis yang telah diterbitkan antara lain: *Azolla Biofertilizer Is an Effective Replacement for Urea Fertilizer in Vegetable Crops*; *Food self-sufficiency: Managing the newly-opened tidal paddy fields for rice farming (A case study in West Kalimantan, Indonesia)*; *The effect of biopesticide and combined fertilization in promoting plant health and growth of tomato cultivated on peat soil in West Kalimantan*.

- Email: [dwwidiastuti@gmail.com](mailto:dwwidiastuti@gmail.com).



*Dina Omayani Dewi, SP, MSc.*

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 7 November 1974. Penulis adalah peneliti di Pusat Riset Ekonomi Prilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat (1998); S-2 pada Jurusan Agronomy/ Farming System Universitas of Philippines at Los Banos (UPLB) (2004); Saat ini bekerja sebagai periset pada Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR-EPS) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak Juni 2022. Karya tulis telah dipublish pada Jurnal Internasional Terindek Global bereputasi Tinggi dan Proseding Terindeks Global di antaranya: Assessing Opportunities to Increase Yield and Profit in Rainfed Lowland Rice Systems in Indonesia (Agronomy Journal 2021), Strengthening the Agroclimatology Analysis against Local Wisdom Paddy Planting Time at Coastal Area in Indonesia(Seminar Internasional).

- Email: malyaputri@yahoo.com.



*Dr. Ir. Surya Abadi Sembiring, M.Si.*

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Penulis lahir di Sondi Raya tanggal 19 November 1961. Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Katolik Santo Thomas. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 1986 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Program Pascasarjana IPB dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Pada Sekolah Pascasarjana IPB Bogor tahun 2011. Penulis menekuni bidang Penelitian tentang Kebijakan pada komoditi pangan/perberasan dari aspek input dan output berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penulis menjadi dosen tetap di Universitas Katolik Santo Thomas sejak Februari 1992- saat ini, menjadi dosen tidak tetap pada Program Pascasarjana USU Magister Agribisnis, sejak 2012- saat ini dan dosen pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada Semester Ganjil Tahun 2016. Penulis telah mempublikasi 2 ( dua) buku, yaitu Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif: Editor: Prof Dr Sukron Kamil, Penerbit PSIA UIN Jakarta- IEN dan Tiri, dan Kebijakan Perberasan Berdasarkan Instruksi Presiden: Tujuan-Kendala-Instrumen Kebijakan dan Implementasinya. Penerbit NEM Pekalongan.



*Dr. Reyna Virginia Nona, S.E., M.M.A.*

*Dosen Ekonomi Pertanian  
Fakultas Ekonomi Universitas Flores*

Penulis lahir di Mauponggo, Flores pada tanggal 13 Mei 1973. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Flores. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1997, melanjutkan S2 Program Studi Agribisnis Universitas Udayana Denpasar, tamat tahun 2007, dan menyelesaikan Program Doktor pada bidang Agribisnis tahun 2019 di Universitas Udayana Denpasar.

Penulis menekuni bidang Penelitian yang berkaitan dengan usahatani, kelembagaan tani dan Ketahanan Pangan serta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi di bidang keilmuan yang dimiliki serta telah mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada berbagai jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional. Penulis juga menjadi reviewer pada Jurnal Analisis Fakultas Ekonomi Universitas Flores dan Jurnal Ide (*Interdisciplinary Journal*) yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena. Penulis

juga aktif menulis di Book Chapter dengan berbagai judul yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya.



*Bayu Mahendra, S.P., M.M.A.*

*Dosen Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik  
Universitas Perwira Purbalingga*

Penulis lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 1991. Penulis adalah dosen pada program studi agribisnis di Universitas Perwira Purbalingga. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan agribisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Melanjutkan program S2 magister manajemen agribisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada prodi agribisnis.

Penulis menekuni bidang penelitian pembangunan pertanian, kebijakan pertanian dan pertanian berkelanjutan. Bidang pengabdian kepada masyarakat penulis juga aktif dengan menekuni ilmu pembangunan masyarakat agribisnis.

# KONSEP EKONOMI PERTANIAN

Bumi merupakan planet di sistem tatasurya yang menyediakan bermacam-macam sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Berbagai macam sumberdaya alam diciptakan oleh Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk ciptaannya yang hidup di bumi dimulai dari sejak diciptakannya manusia pertama di Bumi yaitu Adam as dan Hawa sampai sekarang di era zaman modern.

Pertanian di dunia sejak zaman dahulu (manusia purba) sampai zaman sekarang didukung oleh beberapa macam sumber daya alam yang tersedia di alam sekitar. Air, udara (O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub>) dan sinar matahari merupakan sumberdaya alam yang sebagai kunci dari makhluk hidup dapat hidup dan berkembangbiak di planet bumi. Air digunakan oleh manusia dan hewan untuk minum. Air diserap melalui akar oleh tumbuhan/tanaman digunakan untuk membantu dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya yang dimulai dengan adanya reaksi fotosintesis. Oksigen (O<sub>2</sub>) digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Karbondioksida (CO<sub>2</sub>) digunakan oleh tumbuhan/tanaman dalam reaksi fotosintesis untuk memperoleh energi sehingga dapat menjalankan aktivitas kehidupannya. Sinar matahari digunakan oleh makhluk hidup di alam semesta untuk melangsungkan kehidupannya, seperti pada tanaman/tumbuhan untuk membantu proses reaksi fotosintesis.

